



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Muhammad Umar Syadat Hasibuan

REVOLUSI POLITIK KAUM MUDA



Editor
Yohanes S Widada dkk

Pengantar
Fachry Ali

Revolusi Politik Kaum Muda/Muhammad Umar Syadat Hasibuan
– Edisi pertama – Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008

xvi + 342 hlm.; 14,5 x 21,5 cm

ISBN: 978-979-461-704-5

Judul

Revolusi Politik Kaum Muda
Muhammad Umar Syadat Hasibuan

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All rights reserved

Edisi pertama: Desember 2008

Tim Editor:

Yohanes S Widada (Ketua)

Nazir Amin

Ahmad Nyarwi

Lili Romli

Andi

Desain:

H. Heri Tripurwanto

Y.O.I: 609.26.32.2008

Yayasan Obor Indonesia

Jl. Plaju No.10, Jakarta 10230

Tel: (021) 31926978, 3920114; Fax: (021) 31924488

e-mail : yayasan_obor@cbn.net.id

website : www.obor.or.id

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUHAN	1
1. Bangkitnya Kaum Muda	1
2. Dikotomi Pemimpin Tua-Muda	2
3. Urgensi Kepemimpinan Nasional	11
4. Pluralisme	15
5. Mencari Paradigma Baru	18

BAB II

GERAKAN PEMUDA DARI MASA KE MASA	21
1. Era Pra Kemerdekaan	21
2. Era Kemerdekaan	47
3. Gerakan Pemuda Era Orde Baru	62
4. Era Reformasi	79

BAB III

PONDASI POLITIK MULTIKULTURALISME	87
1. Pluralisme, Multikulturalisme, dan Demokrasi	93
2. Multikulturalisme Indonesia	97
3. Dari Masyarakat Majemuk ke Multikultural	104
4. Indonesia Baru Berbasis Multikulturalisme	106

BAB IV

TANTANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA SAAT INI	109
1. Orde Baru dan Pembonsaian Demokrasi	116
2. Kaum Muda di Tengah Pusaran Globalisasi	133

3. Kaum Muda dalam Sirkuit Liberalisasi Politik 137
4. Pemuda dalam Himpitan Liberalisasi Ekonomi 154
5. Pemuda dalam Himpitan Liberalisasi Budaya 186

BAB V

GAGASAN KEPEMIMPINAN PEMUDA KE DEPAN

- | | |
|---|-----|
| | 205 |
| 1. Mencari Paradigma Baru Kepemimpinan Pemuda | 216 |
| 2. Pemuda dan Kaderisasi melalui Partai Politik | 219 |
| 3. Pemuda dan Kaderisasi melalui Organisasi Sosial, Keagamaan dan kemahasiswaan | 235 |
| 4. Pemuda dan Kaderisasi melalui Komunitas Kebudayaan | 238 |
| 5. Pemuda dan Kaderisasi melalui Kelompok Profesional | 246 |
| 6. Pemuda dan Kaderisasi melalui Komunitas Intelektual | 250 |
| 7. Menghindari Jebakan Paradigma Instrumental dan Jangka Pendek | 255 |
| 8. Merumuskan Kembali Etika Politik dan Kepemimpinan | 260 |

BAB VI

MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA KAUM MUDA

- | | |
|---|-----|
| | 277 |
| 1. Kaum Muda dan Bangkitnya Indonesia | 281 |
| 2. Transformasi Nasionalisme dan Nilai-Nilai Kebangsaan | 282 |
| 3. Kepeloporan Kaum Muda | 321 |
| 4. Memperkuat Negara Bangsa | 324 |

DAFTAR PUSTAKA

335

BAB I

PENDAHULUAN

*We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Joan Baez (1963) ¹*

1. Bangkitnya Kaum Muda

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu menempati peran yang sangat strategis dari setiap peristiwa penting yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemuda menjadi tulang punggung dari keutuhan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang ketika itu. Peran

1. Joan Baez adalah penyanyi balada Amerika yang populer pada 1960-an, karena lagu-lagunya menyuarakan kebangkitan kaum muda dan protes anti perang, hak asasi manusia, dan anti kekerasan. Lagu-lagunya menginspirasi gerakan politik pemuda 1960-an di sejumlah negara.

tersebut juga tetap disandang oleh pemuda Indonesia hingga kini; selain sebagai pengontrol independen terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan penguasa, pemuda Indonesia juga secara aktif melakukan kritik, hingga mengganti pemerintahan apabila pemerintahan tersebut tidak lagi berpihak ke masyarakat.

Pada tahun 2008 ini setidaknya akan ada beberapa peristiwa besar yang akan diperingati oleh bangsa Indonesia berkaitan dengan pemuda. Pertama, peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2008. Pada tanggal itu, seratus tahun lalu (1908) sejumlah pelajar STOVIA dipimpin pemuda Soetomo mendirikan Boedi Oetomo, di Jakarta. Kedua, 28 Oktober 2008 diperingati sebagai 80 tahun Sumpah Pemuda. Ketiga, 10 Tahun Peristiwa Trisakti bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2008 yang juga dianggap sebagai awal bangkitnya era reformasi. Dari ketiga peristiwa penting sejarah bangsa itu terlihat jelas bagaimana kaum muda menjadi pelopor bagi sebuah perubahan.

Dalam konteks global, bukan hanya Indonesia yang memperingati hari bersejarah bagi pemudanya. Publik Prancis pada Mei 2008 mendatang misalnya akan memperingati 40 Tahun Revolusi Mei. Pada bulan itu para mahasiswa Prancis, terutama di Paris melakukan "revolusi" menentang kebijakan pemerintahnya. Meski peringatan itu dimaknai pro dan kontra oleh kaum muda generasi sekarang, mengingat sebagian anak mudanya menganggap gerakan ini hanya milik anak muda kaum Marxis, namun pengakuan akan eksistensi anak muda tetap menggelora di Prancis hingga saat ini.²

Di Myanmar, dahulu bernama Burma, gerakan pemuda yang berdasar keagamaan pun menjadi pelopor perubahan.

2. Les Inrockuptibles, numero 637, 12 Fevrier 2008.

Di negeri itu mada organisasi pemuda bernama Young Men's Buddhist Association (YMBA) yang dibentuk pada tahun 1906. Tokoh-tokohnya antara lain adalah U May Oung, U Kin, dan lain-lain.

Para pemimpinnya adalah pemuda-pemuda Myanmar yang telah mendapat pendidikan Barat. YMBA sebenarnya mencontoh organisasi yang didirikan dua tahun sebelumnya di Universitas Rangoon (Rangoon College). Pada awal pembentukannya organisasi ini masih bersifat non-politik. Tetapi pada tahun 1919, terutama karena pengaruh tokoh-tokoh seperti U Uttuma, YMBA mulai berubah bentuk sebagai organisasi yang menuntut perbaikan-perbaikan politik.³

Dengan melihat peran besar yang dimainkan oleh kaum muda di Indonesia, dan juga di belahan dunia lain, pertanyaan yang kemudian muncul adalah ada apa dengan pemuda? Siapakah yang disebut pemuda itu? Mengapa dia dihadapkan secara berbeda dengan kaum tua dalam perjalanan sejarah?

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda yang memiliki terminologi beragam. Untuk menyebut pemuda, digunakan istilah *young human resources* sebagai salah satu sumber pembangunan. Mereka adalah generasi yang ditempatkan sebagai subjek pemberdayaan yang memiliki kualifikasi efektif dengan kemampuan dan keterampilan yang didukung penguasaan iptek untuk dapat maju dan berdiri dalam keterlibatannya secara aktif bersama kekuatan efektif lainnya guna penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi bangsa.

Meskipun tidak pula dipungkiri bahwa pemuda sebagai objek pemberdayaan, yaitu mereka yang masih memerlukan bantuan, dukungan, dan pengembangan ke arah pertumbuhan

3. Henri Mendras dan Alistair Cole, *Social Change in Modern France: Towards a Cultural Anthropology of The Fifth Republic*, Paris: University Press, 2000 hal 175.

potensi dan kemampuan efektif ke tingkat yang optimal untuk dapat bersikap mandiri dan melibatkan secara fungsional.

Ada yang mendefinisikan pemuda sebagai individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Dengan begitu, pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun kelak. Terutama sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya.⁴

Batasan pemuda berdasarkan umur cenderung memiliki keragaman. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan pemuda sebagai seseorang yang berusia antara 10 tahun-24 tahun. Kanada menyebutkan batasan paling tinggi 24 tahun dengan kategori remaja 13 tahun-19 tahun dan dewasa muda 20 tahun-24 tahun sesuai perkembangan sosial, psikologi, dan kesehatan.⁵

Encyclopedia Americana mengartikan *youth* atau pemuda sebagai *adolescence*, yaitu masa transisi anak-anak hingga dewasa. Jika dicari apa yang disebut *adolescence* itu adalah mereka yang berusia 12 tahun -13 tahun hingga 21 tahun-22 tahun. Ada pula yang melihat batasan pemuda dengan tingkat pendidikan yaitu mereka yang duduk di *Junior High School* hingga *college* dan mulai bekerja. Tetapi bila dikaitkan dengan wajib militer lain lagi, sebab usia yang dipatok 18 tahun.⁶

Namun ada yang memperdebatkan batasan pemuda. Antropolog Amerika Margaret Mead dalam penelitiannya di Samoa, tak ada yang disebut pemuda di kawasan itu, yang ada hanya anak-anak dan dewasa. Dalam bukunya *Coming Age in Samoa* yang dipublikasikan pada 1928, anak-anak di salah

4. Dra. Titin Supenti, MA, "Kondisi Tenaga Kerja Pemuda" dalam situs www.nakertrans.go.id.

5. Ibid.

6. *Encyclopedia Americana*, Vol-1. 1983 entry adolescence hal 175-180.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

tik daripada perdebatan soal usia. Henri Mendras dan Alistair Cole, antropolog Prancis dalam bukunya *Social Change in Modern France: Toward a Cultural Anthropology of The Fifth Republic*, melihat terciptanya tua-muda sebagai akibat interaksi budaya dan politik.

Di Prancis dikotomi tua dan muda ini tampak mencolok pada 1960-an yang akhirnya bermuara kepada Revolusi Mei 1968.⁹ Pasca Perang Dunia ke II di negara ini muncul fenomena yang disebut *baby boom*. Jumlah bayi yang lahir demikian besar itu pada akhirnya memicu tumbuhnya pesatnya jumlah pemuda di Prancis. Membesarnya jumlah kaum muda membuat mereka ingin identitas yang sangat didukung oleh kondisi politik pada masa itu. Maka konflik antar generasi pun tak terhindarkan.

Konflik itu dapat dilihat dari beberapa aspeknya. Pertama, soal identitas yang ditunjukkan melalui perilaku. Para gadis muda Prancis dengan berani memakai celana panjang atau rok mini biar beda dari ibunya. Sedangkan para pemuda berambut panjang atau gondrong, memelihara janggut biar beda dari ayahnya yang berambut pendek dan dicukur bersih.

Kemudian kaum muda mencari idola baru yang notabene adalah bintang-bintang Hollywood seperti James Dean dan Marlon Brando, bukan tokoh-tokoh tua seperti Charles de Gaulle. Film James Dean *A Rebel with A Cause* jadi tontonan favorit masa itu.

Kedua, kaum muda menolak untuk diatur orang dewasa, termasuk dikader untuk menggantikan posisinya. Pada waktu itu, para orang tua dari kalangan borjuis memasukkan anaknya ke organisasi kepanduan dan orang-orang keba-

9. Henri Mendras dan Alistair Cole, *Social Change in Modern France: Towards a Cultural Anthropology of The Fifth Republic*, Paris: University Press, 2000 hal. 175.

nyakan ke organisasi gereja seperti *young christian farmers*, *young christian worker*, *young christian student*. Namun banyak kaum muda lebih menyukai masuk gerakan kiri yang anti kemapanan.

Bukan hanya di Prancis, Amerika juga terjadi fenomena yang sama. Bahkan di Negeri Paman Sam ini muncul gerakan Hippies, yang cinta pada kekuatan yang dapat membebaskan diri manusia dan proses pengasingannya sebagai manusia. Mereka bersikap anti perang, terutama invasi AS ke Vietnam. Mereka memuja Che Guevara yang justru dibenci Amerika.

Seperti halnya di Prancis, bentrokan pun terjadi. Di Amerika grup band The Beatles, Joan Baez, dan Rolling Stone menyuarakan semangat anti perang. Salah satu semboyan yang diusung saat itu adalah "*Make Love Not War*". Mereka ingin perubahan dan kaum tua di mata mereka semena-mena.

N. Daldjoeni dalam tulisannya "Sosiologi Pemuda Indonesia" melihat konflik antar generasi agaknya makin tajam setelah Perang Dunia II. Di negara yang lebih maju, konflik antar-generasi ini lebih bersifat perlawanan kultural, yang ditunjukkan perilaku hippies, sedangkan di negara berkembang yang lebih menonjol aksi perlawanan berdarah.¹⁰

Sementara Soe Hok Gie dalam sebuah tulisannya juga melihat konflik generasi adalah keniscayaan karena masing-masing dipengaruhi zamannya. Masa muda memang usia di mana manusia mencari pola-pola kepribadian yang akan selalu mewarnai. Generasi Soekarno dipengaruhi dunia pada 1920-an, Sutan Takdir Alisyahbana dipengaruhi perkembangan pada 1930-an, sementara Soeharto pada 1940-an.

Gie melihat mahasiswa penuh idealisme kelak berhad-

10. N. Daldjoeni *Sosiologi Pemuda Indonesia: Masalah dan Harapan* dalam Taufik Abdullah, op.cit. hal. 34.

pan dengan realitas. Misalnya mahasiswa jurusan antropologi pada usia 19 tahun penuh semangat meneliti ke Irian Barat, namun akhirnya skripsinya dijual ke tukang buah di Pasar-Minggu, atau ke tukang buku loakan di Pasar Senen.

Mahasiswa Fakultas Hukum sarat ide *rule of law*, namun akhirnya melihat kenyataan terutama sesudah lulus ada hukum yang tak tertulis. Inilah yang terkadang membuat mereka frustrasi, karena apa yang mereka pelajari di bangku kuliah, berbeda sekali dengan kenyataan di lapangan.¹¹

Konsekuensinya, kalau mereka kuat, dengan kekuatan yang ada mereka melakukan perlawanan-perlawanan. Ada yang sekadar berbeda, pokoknya tidak sama dengan kaum tua. Karena itu, segalanya dibuat berbeda, untuk menghilangkan ciri kaum tua.

Tetapi, realitas di lapangan menunjukkan, tidak kurang banyaknya juga, atau malah dominan yang larut, dan ikut arus besar. Yang terjadi kemudian, mereka membebek, membeo, dan masuk dalam barisan, atau memperpanjang daftar orang-orang bermasalah di masa depan. Mereka mengekor, karena ingin cepat kaya, cepat berhasil, tanpa berjuang, atau tanpa berkeringat. Di sini mental terabas mengemuka, mental orang-orang yang ingin sukses, tetapi tanpa berusaha.

Dikotomi tua dan muda dapat juga terjadi karena perbedaan nilai antargenerasi yang didapat karena pengalaman berbeda. Tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau misalnya membuat para perantau dari generasi muda memasukkan nilai luar ke dalam sukunya sekembalinya dari tanah seberang.

Akibatnya timbul pertentangan dengan kaum tua yang

11. Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan*, Yogyakarta: Ombak, 2005; hal. 6-7.

mempertahankan nilai-nilai lama. Pada awal abad ke-19, kaum muda membawa gerakan Wahabi, sehingga menimbulkan bentrokan dengan kaum adat di Sumatra Barat. Implikasinya adalah pecahnya Perang Paderi yang melegenda itu.

Awal abad ke-20 kaum muda membawa nilai-nilai dari pendidikan Barat yang menitikberatkan pada rasionalisme. Mereka juga menginginkan ada kesamaan dalam berhadapan dengan kaum tua yang ingin pelaksanaan agama seperti adat yang sudah ada.¹²

M Fadjroel Rachman dalam tulisan di sebuah blog menyebutkan "*the sunset generation*" untuk menandai generasi pertama kepemimpinan nasional *pasca reformasi*. Hampir 10 tahun terakhir (1998-2007) mereka malang melintang di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta segala bidang politik dan *non-politik*.

Tokoh pemuda ini menghimbau agar pada Pemilu 2009 "*sunset generation*" yang sudah berusia 60 tahun atau lebih untuk mengundurkan diri, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair atau Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Kita tahu, Tony Blair menjabat pada usia 44 tahun (1997) dan mundur pada usia 54 tahun (2007). Presiden AS Bill Clinton menjabat pada usia 47 tahun (1993) dan berakhir pada usia 55 tahun (2001).¹³

Di bidang politik nasional dan lokal, kita mengenal Susilo Bambang Yudhoyono (58), Jusuf Kalla (65), BJ Habibie (71), Megawati Soekarnoputri (60), Abdurrahman Wahid (67), Amien Rais (63), Akbar Tandjung (62), Wiranto (60), Sutiyoso (63), Sri Sultan Hamengku Buwono X (61), dan pemimpin segenerasinya.

12. Soe Hok Gie, *Generasi yang Lahir Setelah Tahun Empat Lima*, dalam Zaman Peralihan.

13. M. Fadjroel Rachman, *Selamat Jalan Pemimpin Tua* dalam Kompas 8 November 2007. Lihat juga <http://pormadi.wordpress.com/2007/11/>

Menurut Fadjroel, proses regenerasi kepemimpinan nasional itu dirusak oleh rezim Soeharto-Orde Baru. Tiga dekade lebih. Jenderal Besar (Purn) Soeharto merampas hak atas kepemimpinan nasional. Apakah *the sunset generation* harus mengulangi perampasan hak atas kepemimpinan nasional serupa Soeharto-Orde Baru?¹⁴

Berkembangnya wacana pemimpin tua dan muda saat ini merupakan sesuatu yang patut disikapi secara wajar, tidak perlu dipertentangkan apalagi diributkan yang penting adalah bagaimana mensinergiskan keduanya. Intinya adalah pemimpin itu entah muda, entah tua bukanlah sesuatu yang harus menjadi beban dan isu politik. Bahkan, yang utama adalah komitmen moral yang utuh dari pemimpin itu. Terlepas dikotomi pemimpin tua dan muda itu, keinginan kaum muda untuk tampil saat ini menunjukkan adanya kegelisahan dan kepedulian dari kaum muda untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa.

3. Urgensi Kepemimpinan Nasional

Menjelang Pemilu 2009 wacana perlunya pergantian generasi bergulir kencang. Ini mengemuka karena dari sejumlah nama yang muncul sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 semuanya stok lama yang dipandang tidak dapat lagi mengadakan perubahan yang signifikan ke arah perbaikan.

Seperti diramalkan media massa, para calon Presiden dari angkatan lama itu, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Amien Rais, Jusuf Kalla, Wiranto, dan Sutiyoso adalah

14. Ibid.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

yang muncul. Untuk itu, kata dia, sudah saatnya kepemimpinan nasional ke depan dialihkan kepada kaum muda yang memiliki potensi di berbagai tempat dan profesi.

Bagi kalangan tua atau generasi yang sudah banyak bergelut dengan persoalan struktur pemerintahan selama ini, Amien meminta sudah saatnya untuk tidak turun gunung lagi atau tidak mencalonkan diri menjadi Presiden pada 2009 nanti.¹⁷

Isu perlunya regenerasi kepemimpinan pun disuarakan sejumlah tokoh pemuda di tahun 2008. Di antaranya, Ketua Umum Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara. Ia menyatakan regenerasi kepemimpinan nasional sangat mendesak bagi Indonesia yang semakin menghadapi beragam tantangan strategis nasional, regional, bahkan global.

Pemimpin yang terpilih dalam Pemilu 2009 mendatang harus dari sosok mandiri yang bisa tegas menghadapi tekanan pengaruh asing. Kalau tidak, kata dia, akan berbahaya terutama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸

Sementara tokoh muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edy, pernah mengungkapkan meski setuju ada alih generasi, prosesnya harus gradual. Itu bisa dilakukan dengan membuat paket pencalonan dalam Pemilu 2009, yang menyandingkan tokoh tua dan tokoh muda. Misalnya, calon Presiden dari tokoh tua, calon Wakil Presiden dari tokoh pemuda.

Namun demikian, kita harus sepakat bahwa regenerasi memang perlu dan mendesak sifatnya. Regenerasi merupakan

17. www.muhammadiyah.or.id

18. Antara, 16 Januari 2008

suatu proses sunatullah (politik), yang tanpanya maka akan terjadi kemandegan (stagnasi) yang serius/gawat. Regenerasi harus dilakukan secara proporsional dan realistis, harus ada pengkondisian sedemikian rupa sehingga alih-kepemimpinan dapat terjadi kapan pun, tanpa dihantui krisis kepemimpinan. Regenerasi dilakukan untuk menerobos krisis kepemimpinan tersebut. Regenerasi mutlak mempersyaratkan kaderisasi, yakni upaya mencari dan membentuk bibit-bibit calon pemimpin yang siap untuk meneruskan kepemimpinan organisasi, dalam suatu proses sirkulasi elite yang sehat dan dinamis.

4. Pluralisme

Isu pluralisme bergulir kencang dengan maraknya konflik primordial setelah lengsernya Soeharto merupakan isu penting lainnya yang patut dicermati kaum muda. Banyak soal yang membuktikan keutuhan bangsa, ternyata masih rawan terurai.

Buktinya, konflik agama di Ambon dan Poso, konflik etnis Dayak-Madura di Kalimantan, permasalahan ras, dan masih banyak contoh lain. Padahal masalah kemajemukan itu sudah disadari dan disepakati tuntas lewat Sumpah Pemuda oleh *founding fathers* pada 1928.

Semangat Sumpah Pemuda ini mengandung nilai, pemuda tidak saja sebagai generasi penerus bangsa, tetapi sekaligus pemersatu bangsa. Realitas bangsa saat ini menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini mulai luntur. Hal itu terlihat dalam berbagai kekacauan sosial yang terjadi dalam NKRI. Kepentingan pribadi (individual) telah mengalahkan kepen-

tingan umum (sosial).¹⁹

Pancasila sebagai pemersatu juga menghadapi masalah. Saat ini meluasnya demokratisasi, dan masih berlangsungnya krisis moneter, ekonomi, dan politik sejak akhir 1997, telah membuat Pancasila sebagai basis ideologis dan *common platform* bagi negara-bangsa Indonesia yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya.

Salah satu penyebab mundurnya peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah karena adanya pencemaran oleh kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya.

Rezim Orde Baru ini juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan secara paksa melalui Penataran P4. Selain itu kebijakan liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi memberikan peluang bagi adopsi asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama (*religious-based ideology*).

Akibatnya jelas Pancasila cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik. Marjinalisasi peran ini bertambah dengan desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin bisa menumbuhkan sentimen "*local-nationalism*" yang dapat tumpang tindih dengan *ethno-nationalism*. Dalam proses ini, Pancasila, baik sengaja maupun tidak (*by-implication*), kian kehilangan posisi sentralnya.²⁰

19. Rizem Aizid *Menghidupkan Kembali Sumpah Pemuda* dalam Suara Karya, 29 Oktober 2007.

20. Kompas, 17 Juni 2004.

Hal yang pasti, pada tahun 2000-an ini ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu munculnya kecenderungan makin sedikitnya pemuda yang benar-benar memperhatikan masalah kebangsaan. Ironisnya tawuran antarmahasiswa tetap marak, seolah-olah tidak mau kalah dengan adik-adiknya yang duduk di bangku SMA.

Dalam situasi seperti itu bagaimana mau bicara soal pluralisme, jika dalam soal-soal sepele saja anak-anak muda sudah saling bertikai? Selain itu anak muda-khususnya di perkotaan-seperti yang tercermin dalam film-film dan sinetron bertema remaja saat ini terkesan tenggelam dalam hedonisme. Perlu suatu gerakan agar kaum muda menemukan kembali jati dirinya.

Barangkali salah satu contoh yang baik dilakukan grup band Cokelat dengan merilis album tentang lagu-lagu nasional dengan gaya anak muda sekarang. Grup band asal Bandung dan berdiri 1996 ini berhasil membuat kalangan remaja mengenal kembali lagu Hari Merdeka, Bangun Pemuda-Pemuda, Halo-Halo Bandung. Hits mereka, *Bendera* yang mendorong kecintaan terhadap Merah Putih cukup melekat di benak setidaknya generasi muda di perkotaan.

Meskipun perlu penelitian lebih lanjut mengenai seberapa jauh mereka telah berandil menanamkan nilai-nilai nasionalisme, setidaknya Cokelat telah berupaya untuk mempopulerkan kembali lagu-lagu kebangsaan kepada para pendengarnya. Jadi bukan hanya melalui seminar-seminar di hotel berbintang atau tempat terbatas untuk menggairahkan kembali agar pemuda kembali ke relnya.

Bisa jadi himbauan-himbauan dari seminar ini seperti masuk dari kuping kiri keluar dari kuping kanan, tenggelam

dalam berbagai persoalan kehidupan dan sekali lagi hingar bingar gaya hidup anak-anak muda sekarang.

5. Mencari Paradigma Baru

Kaum muda dewasa ini memiliki tantangan yang jauh berbeda dengan kaum muda lima tahun silam, sepuluh tahun bahkan seratus tahun silam. Pola-pola pergerakan, semangat juang, bisa dijadikan referensi. Akan tetapi kaum muda dewasa ini hidup dalam alam yang jauh berbeda.

Kaum muda dewasa ini, meski memiliki kemampuan pemahaman terhadap teknologi informasi yang tinggi, akan tetapi buta tentang wawasan nusantara. Buta tentang seluk-beluk ke-Indonesiaan yang senyatanya sangat kompleks. Buta tentang kenyataan, bahwa ke-Indonesiaan ini sangat plural, sangat majemuk, sangat heterogen.

Hal ini bisa terjadi oleh karena semasa di Sekolah Menengah Pertama maupun Menengah Atas, mereka tidak lagi mendapat materi pelajaran tentang ketatanegaraan secara benar. Bisa jadi anak-anak muda dewasa ini tidak lagi mengenal dan memiliki solidaritas yang tinggi, karena selama masa pendidikan mereka tidak lagi mengenal pergaulan antar-sekolah melalui kegiatan bersama. Misalnya Porseni (Pekan Olah Raga dan Seni-Budaya) yang dua dekade silam biasa dilaksanakan di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas.

Guna menata bangunan peradaban bangsa yang relatif baru, maka kepemimpinan pemuda merupakan aspek krusial. Reinvensi kepemimpinan pemuda yang menghimpun jalinan tali persatuan dan mempunyai teropong yang visioner perlu

dirangkai dalam jejaring rekayasa masa depan yang terencana secara strategis. Salah satunya ialah penanaman pendidikan kepemimpinan pemuda secara nasional yang bersifat nasionalis, pluralis, dan strategis dalam pelbagai aspek kehidupan bangsa.

Kepemimpinan pemuda perlu diformat oleh sentuhan berupa *zeitgeist* (jiwa zaman, Hegel) yang melulu membunikan altruisme kebangsaan. Maka setiap elemen pemuda di seantero negeri ini, harus menyadari betul posisinya sebagai bagian dari warga negara yang punya kesadaran hakiki dan kematangan berpikir membangun bangsa.

Format kepemimpinan yang harus diwujudkan, mestinya sesuai dengan “jiwa zaman” yang membangun sistem pribadi-pribadi yang unggul, asketik, arif, dan berlandaskan pada moral etik di atas eksklusivisme primordialistik. Menerobos batas dengan berupaya melampaui konflik kepentingan secara pribadi maupun kelompoknya demi kemaslahatan bersama, ialah prasyarat berikutnya. Di sini, generasi kepemimpinan pemuda harus bijak menyikapi arus globalisasi dan perubahan sosial yang amat cepat dan sering menyeret generasi pemuda dalam logika libido kapitalisme lanjut nan materialistik.

Bagaimana pun, sebuah barisan kepemimpinan pemuda mesti dibangun di atas paradigma yang membebaskan dan mencerahkan. Untuk itu, ia (pemuda) perlu membangun barisan yang cinta khazanah keilmuan dalam samudera *respublica literaria*.

Dalam konteks ini, harus ada paradigma baru dalam melihat, mengelola dan mengembangkan kaum muda Indonesia. Di era globalisasi ini, di mana nilai-nilai mondial atau keinternasionalan sangat terbuka dan tidak bisa ditentukan batas-batasnya, harus ada paradigma baru untuk memper-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

BAB II

GERAKAN PEMUDA DARI MASA KE MASA

1. Era Pra Kemerdekaan

Tentang peran pemuda dalam kehidupan bangsa sudah amat jelas kiranya, apabila kita lihat dari perspektif historis. Bahwa pemuda merupakan elemen strategis dalam perjuangan mencapai maupun mengisi kemerdekaan. Pemuda, dalam konteks ini biasanya ialah mereka yang terwadahi dalam organisasi-organisasi sosial-kemasyarakatan pemuda, maupun partai-partai politik. Pada masa pergerakan nasional yang dimu-

lai pada 1908, para pemuda terpelajar mengawalnya dengan pendekatan organisatoris tersebut, ditandai dengan terutama hadirnya Boedi Oetomo. Sejak itu, pada masa-masa selanjutnya, organisasi kepemudaan hadir dan mewarnai dinamika pergerakan nasional untuk menyebut beberapa di antaranya, Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Islamieten Bond, dan sebagainya. Organisasi-organisasi yang bercirikan primordial itu, pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II, memelopori Sumpah Pemuda yang amat bersejarah itu. Mereka melebur dalam cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dengan demikian, harus diakui bahwa lembaga-lembaga kepemudaan tersebutlah yang mendorong tumbuhnya proto-nasionalisme Indonesia pra-kemerdekaan.

Sebagian sejarawan menyepakati bahwa berdirinya Boedi Oetomo (Budi Utomo), 20 Mei 1908, adalah tonggak dimulainya era baru dalam sejarah Indonesia. Walaupun di sisi lain, dengan alasan yang objektif, ada beberapa pihak yang menyimpulkan Budi Utomo bukanlah organisasi pergerakan yang pertama. Sementara kalangan Islam misalnya ada yang berpendapat bahwa pelopor kebangkitan nasional seharusnya Sarekat Islam (SI), dengan momentum berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) yang berdiri pada 16 Oktober 1905 di Solo.²¹

Terlepas dari polemik itu perkembangan nasionalisme Indonesia dipicu oleh berbagai faktor. Pertama kebijakan Pemerintah Belanda yang diumumkan Ratu Wilhelmina di depan parlemen Pemerintah Belanda tentang kebijakan yang kemudian dikenal dengan kebijakan hutang budi kepada Hindia Belanda. Hasilnya ialah politik etis. Hadirnya kebij-

21. Antara lain diungkapkan sekelompok orang Islam dipimpin Tamar Djaja dalam peringatan ke-51 gerakan nasional pada 1956. dalam peringatan itu hadir Samanhoedi dan Harsono Tjokroaminoto yang waktu itu menjadi Wakil Perdana Menteri. Masalah ini dibahas oleh Deliar Noer dalam bukunya *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta:LP3ES, 1985 halaman 114. Pandangan ini didukung oleh Prof. Dr.Ahmad Mansyur Suryanegara, guru besar ilmu sejarah Universitas Padjajaran.

kan itu sendiri diawali dengan adanya kecaman dari kalangan orang-orang Belanda tentang penderitaan rakyat Hindia Belanda, seperti tertera dalam novel Max Havelaar (1860). Hal itu juga dituangkan dalam tulisan C.Th. Van Deventer yang berjudul "*Een Eereschuld*" (hutang kehormatan) yang dimuat dalam majalah berkala Belanda *de Gids*.

Politik Etis ini dirumuskan menjadi tiga hal pokok, yaitu *educatie*, *emigratie*, dan *irrigatie* (pendidikan, perpindahan penduduk, dan irigasi). Terkait dengan hal pertama, pemerintah kolonial memberikan pendidikan bagi anak-anak Hindia Belanda terutama dari kalangan atas. Sebagai konsekuensinya sekolah-sekolah didirikan untuk mereka.

Sekolah-sekolah yang didirikan terbagi dua, yaitu Sekolah Kelas Dua dan Sekolah Kelas Satu. Sekolah Kelas Satu diperuntukkan untuk anak-anak dari golongan atas, sedangkan Sekolah Kelas Dua untuk rakyat kebanyakan.

Pada 1907 di sekolah-sekolah kelas satu diajarkan bahasa Belanda. Maksudnya agar lulusannya dapat melanjutkan pendidikan ke OSVIA (sekolah untuk menghasilkan pegawai pemerintahan) dan STOVIA (sekolah dokter pribumi). Pada 1914 Sekolah Kelas Satu diubah menjadi HIS (*Hollandsch Inlandsche Scolen*). Pendidikan lanjutan baru didirikan pada tahun sama, yaitu MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*, setingkat SMP sekarang) disusul AMS (*Algemeene Middelbare School*, setingkat SMA).

Sementara itu sejumlah kecil orang Indonesia mendapat kesempatan untuk memasuki sekolah sistem Eropa yang disebut HBS (*Hooger Burger School*). Lalu, karena fasilitas pendidikan tinggi belum ada, mereka melanjutkan ke sekolah tinggi di Negeri Belanda.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Gerakan Pemuda

Pada awalnya Boedi Oetomo adalah gerakan pemuda. Gerakan ini bermula dari serangkaian kampanye yang dilakukan Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo pada 1906-1907. Tujuannya, mulia, sangat mulia malah. Yaitu, untuk menyadarkan para priyayi Jawa agar mau meningkatkan martabat rakyat.

Namun rupa-rupanya kampanye ini membuatnya bertemu Soetomo, Pelajar STOVIA di Jakarta. Dari pertemuan itu Wahidin mengetahui bahwa banyak pelajar di sekolah kedokteran ini mempunyai cita-cita yang serupa dengannya. Itu tentu saja makin melecut semangatnya untuk terus berjuang.

Pada Rabu 20 Mei 1908 bertempat di gedung STOVIA, Jakarta, pelajar-pelajar tersebut mendirikan Boedi Oetomo. Dalam pertemuan tersebut Soetomo ditunjuk sebagai ketua. Hingga Oktober 1908, Boedi Oetomo muncul sebagai organisasi pelajar dengan para pelajar STOVIA sebagai intinya.

Tujuannya merumuskan secara samar-samar "Kemajuan bagi Hindia". Gerakannya hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Pulau Madura. Sampai menjelang Kongres Pertama terdapat 8 cabang, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta I, Yogya II, Magelang, Surabaya dan Probolinggo.²²

Alhasil, Boedi Oetomo mendapat dukungan luas dari kalangan cendekiawan Jawa. Namun seiring dengan makin melebarnya dukungan itu para pelajar menjadi tersingkir dari barisan depan. Generasi yang lebih tua rupa-rupanya mengambil alih pimpinan. Menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo kalangan aristokrasi khawatir bahwa peranan mereka akan tersingkir dengan kehadiran gerakan kaum terpelajar itu.²³

22. Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho Notokusanto (editor, *Sejarah Nasional Indonesia V*), Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal. 178.

23. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid 2, Jakarta: Gramedia Jakarta, 1990, hal. 102.

Pada perkembangan berikutnya, umumnya Boedi Oetomo didukung golongan priyayi rendahan. Itu sebabnya Boedi Oetomo menganggap perlu meluaskan pendidikan barat. Bahasa Belanda adalah prioritas pertama. Sebab dapat membantu menaikkan jenjang kepegawaian kolonial. Pendeknya Boedi Oetomo menjadi cenderung berorientasi untuk kepentingan golongan priyayi daripada rakyat jelata umumnya.

Golongan pemuda yang merasa tidak puas terhadap Boedi Oetomo yang pelan-pelan menjadi perkumpulan kaum tua, mengambil inisiatif lain. Pada 7 Maret 1915, Satiman, Kadarman, dan Sunardi bersama beberapa pemuda lainnya bermufakat mendirikan perkumpulan pemuda. Mereka ingin membentuk komunitas bagi anak-anak sekolah menengah yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura.

Nama perkumpulan ini adalah Tri Koro Dharmo, yang mempunyai arti tiga tujuan mulia: sakti, budhi, bakti. Adapun azas perkumpulan itu;

1. Menimbulkan pertalian antara murid-murid Bumiputera pada sekolah menengah, dan kursus perguruan kejuruan dan sekolah vak;
2. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;
3. Membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia.

Sayangnya, Tri Koro Dharmo tidak mendapat sambutan antusias dari pemuda-pemuda asal Sunda dan Madura. Untuk menghindari perpecahan, pada Kongres di Solo ditetapkan mulai 12 Juni 1918, Tri Koro Dharmo berubah menjadi Jong Java.

Seperti diungkapkan dari anggaran dasarnya yang

ditetapkan pada tahun 1920 perhimpunan ini bertujuan mendidik anggotanya agar mampu menyumbangkan tenaga untuk pembangunan Jawa Raya dengan jalan persatuan. Selain itu organisasi tersebut berkeinginan mempererat persatuan dan menambah pengetahuan umum anggotanya, sekaligus menimbulkan rasa cinta pada budayanya sendiri.²⁴

Pada awalnya Jong Java enggan menjadi organisasi politik. Terbukti pada kongres Mei 1922 disepakati, para anggota Jong Java dilarang menjalankan politik praktis, apalagi menjadi anggota perkumpulan politik. Arahnya agar pemerintah kolonial waktu itu mau mengakuinya sebagai badan hukum. Itu terjadi pada 1923 juga setelah anggaran dasarnya berubah dan disesuaikan dengan permintaan pemerintah Hindia Belanda.

Namun semangat zaman pada waktu itu mau tidak mau menyeret Jong Java dalam gerakan politik. Pada kongres ke VII 1924 ada usulan, Jong Java tetap tidak menjadi perkumpulan politik, tetapi kepada anggotanya yang sudah cukup dewasa diberi kebebasan berpolitik. Ini nampaknya pilihan bijak untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan, atau bahkan perpecahan, yang sebenarnya bisa dihindari.

Perkembangan ini menarik perhatian Haji Agoes Salim. Dia mencoba memasukkan soal agama dalam Jong Java. Sebab menurutnya agama sangat besar pengaruhnya untuk mencapai cita-cita. Usul ini ditolak. Akibatnya kalangan yang seide dengan Agoes Salim kemudian mendirikan Jong Islamieten Bond dengan Islam sebagai dasar perjuangan. Perhimpunan ini juga menerbitkan majalah bernama Al-Noer, sebagai salah satu alat perjuangan, atau setidaknya untuk menyuarakan pe-

24. Marwati, *op.cit.* hal. 190.

san-pesan pergerakan mereka.

Jejak Jong Java diikuti oleh para pemuda asal Sumatera yang ada di Jakarta. Pada 9 Desember 1917, mereka berkumpul untuk membulatkan tekad berhimpun dalam sebuah gerakan perjuangan. Di antara pemimpinnya terdapat Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Nazir Datuk Pamuntjak.

Tujuannya, mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, sekaligus mendidik mereka menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera.

Januari 1918, Nazir Datuk Pamuntjak diutus ke Padang untuk memperkenalkan Jong Sumatranen Bond (JSB). Dengan sokongan Mohammad Taher Marah Sultan di selenggarakan rapat-rapat pelajar di gedung Sarekat Usaha Padang. Mereka yang hadir antara lain pemuda yang belajar di Sekolah Raja, Bukittinggi.

JSB pun mendapat dukungan luas di tanah asalnya. Juni 1919 JSB mengadakan kongres pertama di Padang. JSB Jakarta mengutus Bahder Djohan, Amir, Anas, dan Marzuki menghadiri kongres itu. Tengku Mansyur, Ketua JSB masa itu tidak hadir karena tengah mengikuti ujian Semi Arts, sehingga kongres dipimpin Anas, Amir dan Marzuki. Pada perkembangannya Amir menjadi ketua, Sekretaris Bahder Djohan, dan bendahara dijabat oleh Mohamad Yamin.²⁵

Yang menarik dicatat dari perkembangan JSB ini terjadi pada lunstrum pertama 1923 di Jakarta. Masalah hangat yang dibicarakan saat itu adalah soal bahasa. Hal ini mengingat bahwa waktu itu bahasa Belanda masih menjadi bahasa pengantar bagi segenap aktivitas banyak kelompok pergerakan

25 Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan*, Yogyakarta: Ombak, 2005, hal. 17.

termasuk JBS.

Dalam lustrum itu Yamin mengemukakan gagasannya agar bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar. Sayangnya kalangan tua di dalam JSB menantang gagasan tersebut. Mereka khawatir bahwa gagasan Yamin bakal dianggap Pemerintah Kolonial Belanda sebagai sebuah upaya politik yang bakal mempersulit kedudukan mereka.²⁶

Dalam perkembangannya perkumpulan pemuda yang berdasarkan asal lokal dan bertujuan memajukan budayanya masing-masing kemudian bermunculan layaknya cendawan di musim hujan. Di antaranya adalah Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Pasundan.

Sekalipun bersifat kedaerahan adanya perhimpunan-perhimpunan ini, kalau disadari dengan benar, sebenarnya merupakan benih-benih awal ke arah persatuan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti belakangan dimana pada akhirnya para pemuda Indonesia masa itu merasa perlu mendirikan suatu wadah baru untuk menyatukan derap langkah mereka. Sebab bagaimanapun juga cita-cita mereka adalah sama.

Kongres Pemuda I

Pada 30 April hingga 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda I, di Jakarta. Kongres ini diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan pertemuan besar ini, mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda untuk mencari jalan terbentuknya persatuan di kalangan perkumpulan-perkumpulan ini.

Kongres komite ini sendiri dibentuk setelah diadakan konferensi antara Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong

26. *Ibid*, hal. 18.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pratman dan bendera Merah Putih sebagai bendera pusaka.

Tampil sebagai pembicara antara lain Muhammad Yamin yang menyampaikan pidato berjudul "Dari Hal Persatoean dan Kebangsaan Indonesia". Hal yang berkaitan dengan pendidikan diungkapkan oleh S. Mangoensarkoro, Djokosarwono, Ki Hajar Dewantoro, Poernomowoesan, Ramelan. Sedangkan Mr. Soenario berbicara tentang Pergerakan Pemuda Indonesia.

Apa yang telah didobrak oleh para pemuda Indonesia antara 1926-1928 ini boleh dibilang sangat cepat. Selama itu anggota-anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda pulang ke Tanah Air, seperti Mohamad Nazir, Mononutu, dan Sartono.

Dalam dua tahun itu juga para pemuda yang tinggal di Gedung Indonesisch Clubge Berouw di Jalan Kramat Raya 106 mengadakan pertemuan-pertemuan intensif. Penggagasnya, adalah mereka yang tinggal di tempat itu, antara lain, Sunarko, Kuntjoro, Surjadi, Muhamamd Yamin, Abu Hanafiah, Rusmali, Amir Syarifuddin, Sumanang, dan lainnya.³⁵

Perkembangan berikutnya, tinggal pematangan. Pada 24-28 Desember 1928 dihasilkan keputusan untuk mengadakan fusi (gabungan). Mereka yang mendukung, antara lain Jong Java, Jong Sumatra dan Jong Celebes. Mulanya suatu komisi yang disebut Komisi Besar Indonesia Muda. Komisi ini menyusun langkah selanjutnya. Akhirnya pada 31 Desember 1930 dalam konferensi di Solo berdirilah Indonesia Moeda (Indonesia Muda). Pada waktu berdirinya, Indonesia Muda sudah mempunyai 2.400 anggota dan 25 cabang.

Walaupun Jong Islamieten Bond dan Pemuda Muslimin tidak menggabungkan diri, keberadaan perkumpulan ini, jelas

35. Restu, *op.cit.*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik Indonesia itu sendiri merupakan jerih payah Mohammad Hatta. Hal ini bisa dimengerti. Soalnya, sebelum berangkat ke negeri Belanda, Hatta sudah aktif berorganisasi, dan tentu saja menyentuh politik praktis.

Pengaruh PI meluas ketika serombongan mahasiswa yang bergabung dalam PI ini pulang ke Tanah Air. Salah satu langkah yang dilakukan PI yaitu membentuk beberapa kursus kebangsaan. Langkah ini kemudian memicu munculnya beberapa kelompok studi kebangsaan. Misalnya kelompok studi Indonesia di Surabaya berdiri pada 29 November 1924 oleh Soetomo, seorang dokter dan mantan aktivis PI.

Kemudian Kelompok Studi Umum yang digagas Ishaq Cokroadisuryo yang direalisasikan oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung (kini Institut Teknologi Bandung). Di antaranya oleh Sukarno, atau kelak dikenal sebagai Proklamator Bung Karno.³⁸ Kelompok Studi Umum berdiri pada 25 November 1925. Kelompok ini menggunakan sebagian besar waktunya untuk membahas masalah politik yang berkaitan dengan Indonesia merdeka.

Pada Oktober 1926 Kelompok Studi Umum menerbitkan majalah bulanan Indonesia Moeda. Majalah ini dipimpin Sukarno yang menyumbangkan sebagian besar artikelnya. Di antara artikel yang terkenal dimuat secara bersambung pada edisi pertama hingga ketiga, adalah "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme". Intinya Sukarno berpendapat ketiga aliran yang ada di Indonesia itu berasal dari satu dasar yang sama, yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme barat. Dan untuk itu harus bersatu untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada.³⁹

38. Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Perjalanan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998*. Jakarta, 1999. hal.26.

39. Ingleson, *op.cit* hal.25



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

lainnya, pada 4 Juli 1927 diputuskan secara terbuka pembentukan partai politik baru yang akan dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Sebelum diadakan kongres ditunjuk pengurus pusat sementara yang terdiri dari Sukarno sebagai ketua dan Iskaq sebagai sekretaris merangkap bendahara dan Dr. Samai sebagai komisioner.⁴³

Walaupun hubungan secara organisasi antara PNI dan PI tidak ada, namun sukar untuk dilepaskan bahwa terjadi hubungan sangat erat dengan PI di Belanda. Soalnya, sasaran pokoknya juga sama, yaitu Indonesia Merdeka. Caranya memadu semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional dengan mengarahkan pada pergerakan rakyat yang sadar akan pentingnya sebuah kemerdekaan.

Untuk memperoleh pergerakan yang sadar, perkumpulan perlu mempunyai azas dan tujuan yang terang dan tegas. Selain itu, perlu mempunyai teori nasionalisme yang radikal dan dapat menimbulkan kemauan yang satu.⁴⁴

Pada perkembangan berikutnya PNI mengadakan serangkaian pertemuan dengan berbagai kelompok. Di antaranya, Partai Sarekat Islam Indonesia, Boedi Oetomo, Pasundan, Soematraneenbond, Kaum Betawi, Kelompok Studi Indonesia dan Kelompok Studi Umum, dan lain sebagainya. Dalam sebuah rapat pada 17-18 Desember 1927 di Bandung pertemuan-pertemuan ini menghasilkan suatu federasi, yaitu permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).⁴⁵

Keberadaan Sumpah Pemuda seperti yang diterangkan di atas tidak bisa dilepaskan dari pengaruh PNI. Pengaruh itu ialah yang memicu kesadaran sehingga sampai pada kecenderungan untuk bersatu. Terbukti dengan bergabungnya

43. Ingleson, *op.cit.* hal.35

44. Marwati, *op.cit.* hal.210

45. *Ibid.*, hal.211.

hampir semua perkumpulan Pemuda Indonesia ke dalam suatu wadah Indonesia Muda.

Pergerakan Perempuan

Satu hal, semangat untuk bersatu juga terjadi pada organisasi-organisasi perempuan. Dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta dihasilkan suatu organisasi persatuan wanita berbentuk federasi. Namanya Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI). Pada kongres kedua 28-31 Desember namanya berubah lagi menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII).⁴⁶

Sayangnya, kiprah perempuan dalam organisasi pemuda tak banyak disebutkan dalam literatur-literatur, atau bahkan buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah. Peran perempuan dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepertinya dipisahkan dari pergerakan pemuda. Seolah-olah kaum pemuda, terdiri dari laki-laki saja. Padahal dalam kongres pemuda 28 Oktober 1928, isu tentang kedudukan perempuan juga disinggung. Malah, di dalam organisasi pemuda terdapat juga anggota perempuan.

Sayangnya pula tak banyak literatur yang mengungkap peran mereka. Dari minimnya catatan sejarah itu, ada beberapa nama yang ditemukan penulis, sebagai sosok perempuan yang berkiprah dalam pergerakan. Di antaranya, Dahlia, yang kemudian bernama Dahlia Roem, karena menjadi istri Moehammad Roem.

Perempuan yang mengenyam pendidikan di HIS dan *Frobel Kweekschool* (sekolah guru Taman Kanak-kanak) di Bandung disebut sebagai aktivis Jong Java dan kemudian ikut

46. Ibid., hal.213.

Jong Islamieten Bond pada 1925. Begitu lulus Dahlia pindah ke Malang dan memimpin seksi perempuan JIB cabang Malang dan sebuah organisasi kepanduan. Aktivasnya di JIB ini membuatnya bertemu dengan Mohammad Roem.⁴⁷

Contoh lain dari sedikitnya tokoh perempuan yang tercatat itu, ialah Lena (kemudian menjadi Lena Soekanto) kelahiran Bolang Mongondouw 23 Mei 1912. Lena mula-mula mengenal dunia politik ketika berada di Jakarta. Ia mengikuti ayahnya yang dipindahtugaskan oleh Gubernur Jenderal de Graaf. Belanda kecewa karena sang ayah membiarkan aktivitas Partai Sarekat Islam sewaktu menjabat sebagai Rijkbestuur di daerahnya (semacam Mangkubumi di Jawa).

Di Jakarta ini Lena masuk Jong Celebes yang diketuai Senduk (yang kemudian dikenal sebagai dr. Senduk) sewaktu masih duduk di bangku MULO. Ketika Jong Celebes melebur ke Indonesia Muda, Lena tetap meneruskan aktivitasnya dan menjadi Sekretaris Indonesia Muda cabang Jakarta.⁴⁸

Ada juga kalangan perempuan yang mendapatkan posisi pimpinan dalam organisasi kepemudaan, walaupun hanya pimpinan cabang. Misalnya saja Badiah Moerjati, Ketua Jong Java cabang Salatiga pada 1926, ketika usianya masih belasan tahun. Dia juga memimpin organisasi kepanduan Jong Java. Aktivis perempuan lainnya Joannah Masdani dari Jong Minahasa. Dia juga bergabung dalam organisasi kepanduan INPO. Dalam satu kesempatan dia mengatakan: "Kami mempunyai kepanduan *Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie* (INPO). Saya menjadi anggota kepanduan ini pada 1927. Saya ingat dasi kami merah putih. Saya selalu merasa bangga jika di jalan bertemu dengan pandu-pandu dari organisasi Belanda. Ada perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia

47. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983 hal.11-120

48. *Ibid.*, hal. 147-161.

karena kami punya pandu Indonesia”⁴⁹

Kiprah pemuda perempuan dalam politik yang cukup nyata terjadi di Sumatera Barat. Surat kabar *Soenting Melayoe* yang terbit di Padang 1920-an mempunyai seorang jurnalis perempuan bernama Roehana Koeddoes yang masih berusia belasan tahun.⁵⁰

Bahkan sejarawan Taufik Abdullah melihat ada beberapa aktivis perempuan muda di organisasi pergerakan radikal di Minangkabau ini. Rasimah Ismail, aktivis PERMI misalnya ketika ditangkap pada 1930-an masih berusia 18 tahun.⁵¹

Seperti pergerakan kaum perempuan yang kurang mendapat tempat dalam catatan sejarah pergerakan kaum muda di Tanah Air, hal yang sama terjadi pada gerakan kependuan. Sejarah peranan pemuda kadang mengabaikan peranan kependuan sebagai suatu organisasi pemuda yang sebetulnya cukup kuat. Padahal, kita tahu, organisasi kependuan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional, cukup mewarnai sejarah perjuangan Republik ini.

Sebagian besar organisasi kependuan yang muncul boleh dibilang merupakan *onderbouw* organisasi orang dewasa. Organisasi kependuan yang muncul masa itu antara lain JPO (*Javaanse Padvinders Organizatie*) JJP (*Jong Java Padvindery*), NATIPIJ (*Nationale Islamitsche Padvindery*), SIAP (*Sarekat Islam Afdeling Padvindery*), HW (*Hisbul Wathon*), dan lain sebagainya.

Deliar Noer dalam bukunya, menyebutkan Hizbul Wathon didirikan Kyai Haji Achmad Dahlan setelah melihat organisasi kependuan Kristen berlatih. Pada 1918 ia membentuk

49. Mengenai siapa Badiyah Moenyati lihat, *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Jilid I Jakarta: Balai Pustaka 1982, hal. 61-78. Mengenai Johanna Masdani lihat halaman 112.

50. Lihat *Soenting Melayoe* edisi 5, 13, 21 dan 23 Januari 1921.

51. *Fortuna* edisi 01, 11 Februari 1999. Artikel "Jejak Gender dalam sejarah"

Hizbul Wathon. Anggotanya selain diberikan latihan kepanduan umumnya, diberi materi pelajaran agama dan latihan organisasi. Arahnya membentuk kader Muhammadiyah dan kelak ketika dewasa, para kadernya itu diharapkan bergabung ke dalam Muhammadiyah.⁵²

Seperti halnya yang terjadi pada organisasi pemuda dan gerakan perempuan, semangat bersatu juga menular pada gerakan kepanduan. Hal itu terjadi pada 1930, ketika sejumlah organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938.

Pada masa itu menjadi pandu Indonesia merupakan suatu kebanggaan. Nasioanlisme menjangkiti mereka yang masuk kepanduan yang dibentuk bangsa sendiri. Di antara mereka terdapat Rier Boenakim yang kelak menjadi salah tokoh kepanduan Indonesia. Pada usia 14 tahun ia bergabung dalam KBI.

“Kami melakukan kegiatan seperti pemberantasan buta huruf pada anak-anak maupun orang dewasa. Kepada orang dewasa ini juga diberikan keterampilan menjahit, merenda dan membordir”⁵³

Perkembangan setelah 1930 pergerakan nasional Indonesia sebetulnya sudah memasuki masa matang. Sekalipun Pemerintah Kolonial semakin represif dan reaksioner. Penangkapan-penangkapan dan pembuangan terhadap tokoh-tokoh PNI seperti yang terjadi pada Sukarno, Gatot Mangkoepradja, Narkoen Soemadiredja pada 1929 adalah salah satu con-

52. Deliar Noer, op.cit. hal. 91

53. Sumbangsihku, jilid I, hal. 52



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

bagai unsur dalam masyarakat untuk kepentingan perangnya. Pada masa 1942-1945 terdapat 50 ribu orang anggota berbagai partai politik, 130 ribu orang pelajar swasta, yang dua kali jumlah pelajar sekolah negeri, 20 ribu murid Muhammadiyah. Mereka ini nanti menjadi *elite* Indonesia.⁵⁸

Pada masa pendudukan Jepang Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah. Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, sedangkan Jawa-Madura dimasukkan ke dalam pengawasan Angkatan Darat ke-16. Kedua wilayah ini di bawah Angkatan Darat Wilayah ke-7 yang berpusat di Singapura. Kalimantan dan Indonesia Timur lainnya berada di bawah Angkatan Laut.

Beberapa organ pembentukan Jepang yang penting antara lain Masyumi gabungan unsur NU dan Muhammadiyah, serta majelis Islam ala Indonesia, Putera (Pusat Tenaga Rakyat), bagian militer antara lain Heiho, PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membuka kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk ikut latihan militer secara luas.

Lembaga yang dibentuk antara lain, Korps Pemuda Semi-Militer Seinendan pada April 1943 untuk pemuda berusia 14 - 25 tahun, Heiho (pasukan pembantu) yang menjadi bagian militer Jepang. Khusus untuk Heiho ini jumlahnya mencapai 25 ribu pada akhir perang. Namun organ militer terpenting adalah Pembela Tanah Air (PETA) pada Oktober 1945 sesuai catatan sejarah yang ada.⁵⁹

Anti Belanda

Pendudukan Jepang juga membawa kampanye anti barat yang mempertajam sentimen anti Belanda di kalangan

58. R.Z. Leirissa, *Terwujudnya suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hal. 87.
59. M.c. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989; hal. 302.

masyarakat Indonesia. Dilarangnya penggunaan Bahasa Belanda juga membantu pengukuhan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah sekaligus juga bahasa persatuan. Di kota-kota besar terutama di Bandung para pemuda berpendidikan menggalang jaringan bawah tanah yang umumnya berada di bawah pengaruh Syahrir. Kelompok ini merupakan cikal bakal kelompok militan.

Ketika Jepang mulai terdesak akhirnya mereka membentuk BPPKI (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Namun tidak semua pihak setuju cara BPPKI, terutama kaum muda. Mereka yang menentang antara lain datang dari Asrama Menteng 31 (misalnya Chaerul Saleh, Asrama Indonesia Muda dan *Ika Dai Gakku* (asrama mahasiswa kedokteran).

Mereka inilah yang terlibat dalam peristiwa Rengasdengklok. Seperti yang diungkapkan peneliti dari Amerika, Benedict Anderson bahwa pemuda adalah yang berperan dalam terjadinya kemerdekaan. Anderson mengungkapkan pemuda Indonesia, terutama di Jawa saat itu tiba-tiba menjadi militan dan revolusioner.⁶⁰

Sejarah juga membuktikan, tokoh-tokoh utama di pentas politik pada awal kemerdekaan ini, mereka yang sudah berjuang sejak masih menjadi pemuda. Soekarno, Hatta, Mohammad Roem, Yamin, Syahrir, Amir Sjarifuddin, sekalipun mereka mempunyai perbedaan secara ideologis dan cara yang ditempuh, namun memiliki cita-cita yang sama, yakni negara Indonesia.

2. Era Kemerdekaan

Peranan pemuda dalam pelopor sejarah kembali terjadi

60. Ben Anderson, *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta.

di awal kemerdekaan. Salah satu peran yang dicatat dengan tinta biru ialah apa yang disebut sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kita tahu, yang dimaksud dengan Peristiwa Rengasdengklok adalah sebuah gerakan “penculikan” yang dilakukan oleh sejumlah pemuda (antara lain Adam Malik dan Chaerul Saleh) dari Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta, pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30. WIB. Ketika itu Soekarno dan Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat pengucapan proklamasi.

Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul Saleh dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok, di rumah Djiaw Kie Siong. Naskah teks proklamasi sudah ditulis di rumah itu. Bendera Merah Putih sudah dikibarkan para pejuang Rengasdengklok pada Rabu tanggal 15 Agustus. Para pemuda yakin bahwa esok harinya Indonesia akan merdeka.

Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Mr. Achmad Soebardjo. Akhirnya, Kunto dan Achmad Soebardjo ke Rangasdengklok untuk menjemput Soekarno,

Hatta, Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra, atau karib disapa Mas Tok, anak pertama pasangan Bung Karno dan Ibu Fatmawati.

Achmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta.

Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Dan sejak itu, secara de facto Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri, meski masih harus dibarengi perjuangan diplomatik untuk mendapat pengakuan dari seluruh dunia, termasuk dari badan dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemuda Bersenjata

Para pemuda dan pelajar juga ikut terlibat dalam perjuangan bersenjata. Sejarah mencatat adanya Barisan Keamanan Rakyat (BKR) bagian pelajar pada 1945 yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Pelajar, lalu menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Mereka juga terlibat dalam berbagai pertempuran berdarah, dengan berondongan senjata, terutama di Pulau Jawa.

Salah satu pertempuran yang bisa dijadikan contoh betapa besarnya keterlibatan kaum muda dalam pertempuran bersenjata untuk merebut kemerdekaan, adalah baku tembak di Kota Malang. Begitu besarnya pertempuran yang terjadi pada 31 Juli 1945 itu akhirnya menewaskan 34 orang pelajar.

Di lapangan politik pun, pemuda jelas juga ikut bergerak. Wujudnya, antara lain Kongres Pemuda Indonesia IV pada 9-11 November 1945 di Yogyakarta. Ketika itu, tampak telah terjadi perubahan-perubahan mendasar pada gerakan kepemudaan.

Jumlah dan corak organisasi kepemudaan telah mengalami pergeseran. Boleh dikatakan pada waktu diadakan kongres terdapat sejumlah organisasi pemuda yang lebih merupakan barisan bersenjata. Bahkan sebagian nama-nama yang dipakai memakai kata "angkatan", yang dengan mudah dikenali sebagai bagian dari ciri militer.

Jumlah utusan mencapai 400 orang. Mereka tergabung dalam berbagai organisasi, atau perhimpunan kepemudaan. Diantaranya, Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan Republik Indonesia, Angkatan Muda Jawatan Gas dan Listrik, Angkatan Muda Indonesia Surabaya, Angkatan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.

Kemudian ada pula Angkatan Kantor Pusat RI, Ikatan pelajar Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, gerakan pemuda Jawatan Kereta Api, Angkatan Muda Indonesia Kalimantan dan lain sebagainya.⁶¹

Kongres yang berlangsung pada 9 November 1945 ini, merupakan ajang pertemuan besar kaum pemuda di alam kemerdekaan. Pembukaannya dihadiri oleh Presiden RI dan beberapa menteri. Suasana perjuangan sangat terasa dalam kongres.

Misalnya saja pada hari kedua datang kurir dari Surabaya mengabarkan ultimatum Mayor Jenderal Mindergh yang akan menggempur Surabaya. Kemarahan pun menular di antara

61. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Rengasdengklok. Juga Muhammad Dimiyati, *Sejarah Perjuangan Indonesia, 1950* yang dikutip oleh Muhammad Hatta dalam *Sekitar Proklamasi*, Jakarta: Tintal Mas, 1982 menceritakan peristiwa ini dengan versinya melihat tindakan itu sebagai legenda para pemuda. Menurut dia Belanda tetap akan mempertahankan kekuasaannya, apa karena kemerdekaan itu hadiah dari Jepang atau kehendak dan upaya sendiri.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Di dalamnya, terdapat tidak sedikit organisasi pemuda yang tidak bergabung pada BKPRI, misalnya Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pemuda Demokrat dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Alhasil, upaya untuk mempersatukan organisasi kepemudaan tidak membawa hasil menggembirakan.⁶⁵

Kongres Pemuda berikutnya di alam kemerdekaan yang diadakan di Surabaya 8-15 Juni 1950 mencoba mempertemukan kembali kaum pemuda dari berbagai unsur, dan kalangan, atau organisasi. Hadir utusan-utusan dari 47 organisasi, peninjau dari 25 organisasi, di antaranya 14 badan federasi, bahkan wakil dari Perjuangan Pemuda Irian.

Soal-soal yang dibicarakan antara lain kesederhanaan organisasi pemuda dan azas-azas perjuangan. Juga dibahas isu besar masa itu yaitu peleburan negara-negara bagian ke dalam Republik Indonesia. Kongres ini memang berhasil membentuk badan kerjasama yang diberi nama Front Pemuda Indonesia (FPI), namun fakta sejarah menunjukkan, organisasi baru ini, tidak banyak bekerja.⁶⁶

Perang Kemerdekaan memberikan implikasi bagi pemuda Indonesia yang kebetulan berada di luar negeri. Pada Juli 1946 sekitar 70 pemuda Indonesia yang belajar di Timur Tengah terkatung-katung karena pecahnya perang kemerdekaan di Jeddah, Medinah, Kairo.

Di Mesir para pemuda tergabung dalam Persatuan Pemuda Indonesia-Mesir menyuarakan kemerdekaan dan membantu pelaut-pelaut Indonesia yang terkatung-katung. Juga menarik dicatat, pelaut yang ada di negeri Belanda melakukan aksi pemogokan terhadap kapal-kapal Belanda,

65. *Ibid.*, hal.11

66. *Ensiklopedia Umum*, op.cit.

karena masih terus bernafsu untuk menjajah, dan menganek-sasi negara lain.⁶⁷

Para pemuda perempuan atau pemuda juga ikut ambil bagian dalam Perang Kemerdekaan. Sayangnya tidak banyak literatur yang mengungkapkan kontribusi mereka. Padahal tidak sedikit di antara mereka ikut berjuang, sampai menin-galkan keluarganya.

Paling tidak mereka ikut menjadi relawan Palang Me-rah Indonesia (PMI) yang dibentuk pada 17 September 1945. Para gadis belia ini menjadi unit pengangkut korban terluka hingga perawat. Tak jarang di antara mereka terbunuh dalam kontak senjata.⁶⁸

Sebetulnya pada pada 15 Desember 1945 berdiri Per-kumpulan Pemuda Putri Indonesia namun tak banyak ditemukan apa saja kiprahnya. Yang paling menonjol adalah majalah-majalah yang memuat pergerakan perempuan yang melibatkan mereka sebagai ibu rumah tangga pendamping suami. Kalau pun ada yang lain, ya perempuan yang sudah bukan muda lagi, misalnya S.K. Trimurti.⁶⁹

Juga tidak banyak literatur yang mengungkapkan pada 1 Maret 1950 Siti Dalima, seorang relawan PMI memben-tuk Palang Merah Pemuda (PMP). Pada waktu itu sudah terbentuk 15 cabang dengan 2047 anggota. Organisasi pemuda di bawah naungan PMI ini ikut dalam berbagai tu-gas sosial, penyadaran higienis dan perbaikan kesehatan pada masyarakat, membantu penyebaran susu dari UNICEF dan memberikan sejumlah barang pada korban Peristiwa Repu-blik Maluku Selatan (RMS) di Ambon.⁷⁰

67. Merdeka, 24 Djepil 1946

68. Noersjamsoe, "The Part of Indonesian Girls in The National Struggle" dalam *The Voice of Indonesia* edisi 31, 23 Agustus 1946. Lihat Juga Majalah PMI yang terbit pada 1950-1955 memuat beberapa artikel kisah heroik para pemuda. Antara lain menyebutkan tewasnya juru rawat Fatimah akibat Agresi kedua di Jawa Tengah.

69. Majalah Wanita edisi 7, 28 April 1950 hanya memuat sedikit. Pada edisi lain majalah yang terbit pada 1950-1951 ini lebih banyak berkisah pada peran domestik wanita.

70. Sejarah PMI 1945-1953, Jakarta; PMI DKI, 1953, hal:38

Demokrasi Liberal

Periode demokrasi liberal, di awal tahun 1950-an, yang oleh beberapa sejarawan dikatakan memberi dampak positif bila dilihat dari pendewasaan pendidikan politik ternyata tidak berlaku bagi lahan mahasiswa. Terbukti, ketika pertemuan Madjelis Permoesjawaratan Mahasiswa (MPM) PPMI, Desember 1955 di Bogor memutuskan untuk menarik keanggotaannya dari FPI.

Kelompok mahasiswa ini menekankan kembali ke kampus dan menekankan kebebasan akademik. Pada 1950-an nampak mahasiswa lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan rekreasi, perpeloncoan, mencari dana untuk aktivitas keder-mawanan dan jarang menghadiri pertemuan-pertemuan yang berwatak serius. Hanya segelintir mahasiswa yang prihatin atas kemunduran gerakan mahasiswa tersebut. Tak menghe-rankan waktu itu ada slogan "Buku, Pesta dan Cinta".⁷¹

Bahkan aktivis mahasiswa menjadi sekadar *Underbouw* di bawah ketiak partai-partai orang dewasa. Persiapan mengha-dapi Pemilu tahun 1955 menyebabkan partai-partai berusaha mencari kader-kader baru yang cakap dan mereka melihatnya ada pada mahasiswa. Padahal seharusnya menjadi momentum untuk menggairahkan kembali gerakan mahasiswa.⁷²

Mereka memang bergerak namun yang terbentuk or-ganisasi-organisasi mahasiswa yang lebih kuat berafiliasi ke partai, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafiliasi ke PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GERMASOS) afliasinya ke PSI terutama berbasis di UI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berafiliasi lebih ke Masyumi, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang pada masa demokrasi terpimpin secara terbuka

71. Nur Farid, SH, Gerakan Mahasiswa Indonesia, http://www.geocities.com/apil-berlin/utama1_5.html. Nur Farid adalah Pekerja Politik dan Mantan Direktur Yayasan Cakrawala Timur-Surabaya.

72. Ibid.

berdampingan dengan PKI.

Sementara itu PPMI setuju dengan posisi yang apolitis. Hanya pada Kongres PPMI ke-4 tahun 1957, ketika organisasi-organisasi yang berafiliasi ke partai diperbolehkan menjadi anggota PPMI, maka PPMI berhasil didorong maju. Hal ini bisa dipahami karena banyak jabatan eksekutifnya yang kemudian dipegang oleh CGMI dan GMNI, terutama setelah kongres PPMI ke-6 tahun 1961.

Keberhasilan menduduki posisi-posisi strategis di PPMI diperoleh CGMI dan GMNI setelah melalui pertarungan dan intrik politik yang kompleks melawan kelompok-kelompok lain. Jadi tidak benar bila ada yang mengatakan bahwa CGMI dan GMNI menang karena memperoleh keistimewaan pada masa demokrasi terpimpin. Sudah dari awalnya mereka berjuang dan berhasil mendorong maju gerakan mahasiswa (PPMI) yang sedang berada dalam status demoralisasi.⁷³

Pemilu Demokratis

Sejarah mencatat bahwa Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI dan Masyumi masing-masing mendapat 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI 35 kursi dari 257 kursi yang disediakan. Pemilu pertama di alam kemerdekaan ini, disebut-sebut paling demokratis, sepanjang sejarah Republik Indonesia, sampai hari ini. Pemilu 1955 ini juga paling riil menggambarkan kekuatan politik masa itu.

Demokrasi Liberal runtuh karena stabilitas politik tidak pernah terjadi. Kabinet mudah sekali dijatuhkan sementara upaya-upaya disintegrasi mengancam dengan seriusnya. Di berbagai daerah timbul pergolakan, mulai dari Darul Islam

73. Independent No.11, 31 Januari 1995.

di sejumlah daerah, hingga PPRI-Permesta yang kesemuanya mendorong ketegangan politik yang luar biasa. Selain itu perekonomian Indonesia tak kunjung pulih. Namun yang paling krusial parlemen gagal mencari solusi konstitusi apa yang akan dipakai.

Pada 5 Juli 1959 terjadi peristiwa yang luar biasa dan menentukan jalannya sejarah Indonesia selanjutnya. Pada hari itu Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran Badan Konstituante. Badan ini dinilai gagal melaksanakan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, hingga Soekarno menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada waktu itu posisi politik Soekarno menguat, sejalan dengan munculnya PKI dan Angkatan Darat yang saling berseteru.

Umumnya literatur sejarah mencatat sejak 1959 hingga 1965 disebut sebagai masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu situasi perekonomian Indonesia merosot ke titik nadir. Pembangunan yang dilakukan didominasi oleh proyek-proyek mercusuar. Kecuali keberhasilan merebut Irian Barat, politik luar negeri Indonesia cenderung ke arah garis Pyongyang-Beijing-Jakarta. Sedangkan Konfrontasi Malaysia hingga keluar dari PBB merupakan bukti Sukarno mencoba mengalihkan masalah dalam negeri dengan menaikkan rasa nasionalisme merupakan sebuah strategi keliru.

Persoalan utamanya bukan saja ketegangan politik yang terjadi antara PKI dengan Angkatan Darat, pembubaran Masyumi yang membuat Soekarno pelan-pelan mengumpulkan banyak lawan. Tetapi karena kehidupan rakyat yang benar-benar morat marit. Situasi serba tidak menentu dan penuh ketegangan itu kemudian bermuara kepada Peristiwa



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dan mencoret-coretinya. Nyanyian nyanyian perjuangan segera dilahirkan;

*Tek kotek kotek,
Ada menteri tukang ngobyek
Blok goblok goblok
Kita ganyang menteri goblok*

Di dekat Bank Indonesia mahasiswa-mahasiswa menyedot mobil-mobil dan kemudian mereka pinjam becak untuk ditumpuk dijadikan barikade. CPM-CPM yang meminta mereka agar jangan mengganggu lalu lintas sampai kewalahan.

Akhirnya gas air mata berbicara. Victor mahasiswa Tingkat II kena dan terduduk di jalan sambil kucek-kucek matanya, CPM tadi mendekatinya "Maaf dik, saya terpaksa lempar gas air mata" sambil menyerahkan sapu tangan untuk menolong Victor. Dari sini kelihatannya tentara pada hakikatnya menyokong tuntutan mahasiswa yang adil.⁷⁵

Sayangnya Sidang Kabinet Dwikora hanya mencatat hasil konkret turunnya harga bensin dari Rp 1.000,- menjadi Rp 500,- sedangkan harga lainnya bertahan. Gelombang demonstrasi terjadi lagi Februari 1966. Pada waktu itu jatuh korban mahasiswa UI Arief Rachman Hakim.

Dan sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah pada 11 Maret 1966, yang kemudian dikenal dengan Supersemar. Jenderal Soeharto kemudian menjadi Presiden di tahun berikutnya melalui Sidang Umum MPRS 1967. Orde Baru pun lahir sebagai koreksi atas Orde Lama dan melaksanakan tekadnya melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Suatu periode dalam sejarah Indonesia berakhir dan periode lainnya dimulai.

75. *Ibid.* Dalam tulisan yang lain berjudul "Setelah tiga Tahun", dalam buku yang sama Gie mengungkapkan bahwa anggota parlemen mahasiswa mendapat mobil Holden, tiket KA, dan tiket pesawat terbang gratis untuk ke luar negeri dengan dalih tugas parlemen. Mereka dijebak golongan *vested interest*.

3. Gerakan Pemuda Era Orde Baru

Dalam melaksanakan pemerintahannya Presiden Soeharto dibantu kelompok ilmuwan Universitas Indonesia (UI) yang melanjutkan kuliah di Universitas Berkeley, Amerika Serikat yang kemudian dikenal sebagai "Mafia Berkeley". Jenderal Besar ini juga disokong sejumlah asisten pribadi (aspri) Presiden yang mencoba membenahi kehidupan ekonomi dan sosial politik. Dari situ dikembangkan rencana pembangunan yang disebut sebagai tahapan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Model pembangunan yang berorientasi pada fenomena *trickle down effect* membutuhkan stabilitas sebagai syarat utama.

Karena itu, pada 1973 terjadi penyederhanaan partai politik dan kebijakan massa mengambang (*floating mass*). Sejarah kemudian mencatat munculnya tiga partai politik yakni Golongan Karya (Golkar) yang mewakili kalangan pekerja, dan kaum profesional. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewadahi bekas partai-partai Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menampung kaum nasionalis dan eks partai Kristen.

Mahasiswa Parlemen

Perkembangan yang menarik ialah sebagian tokoh mahasiswa yang ikut bergerak pada demonstrasi 1966 masuk dalam parlemen atau DPR-GR. Masuknya tokoh-tokoh mahasiswa ini menimbulkan harapan tetapi sekaligus juga kekhawatiran. Intinya, sebagian para mahasiswa parlemen itu dinilai tidak memiliki semangat juang, seperti yang pernah mereka suarakan dulu.

Sekalipun tokoh-tokoh mahasiswa itu berasal dari

KAMI yang memiliki andil besar (bersama militer) dalam menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soekarno, namun mulai muncul kekhawatiran bahwa suara yang mereka bawa bukanlah suara mahasiswa.

Seperti kritik Soe Hok Gie pada tulisannya menjelang ulang tahun ke-2 KAMI, ujian pertama kalangan pemuda pejuang itu, justru datang ketika mereka menjadi anggota DPR-GR, atau kaum legislatif. Adik kandung Sosiolog Arief Budiman ini, menyebutkan mahasiswa terbagi oleh dua arus besar. Yaitu apa yang disebutnya sebagai golongan "*moral force*" yang melihat racun berbungkus madu di atas kursi empuk DPR-GR. Golongan lain ialah golongan politik yang setuju masuk parlemen karena suara mereka diperlukan untuk voting anti-Soekarno dan untuk menyusun UU Pemilihan Umum.⁷⁶

Kenyataannya, kecurigaan Soe Hok Gie benar adanya. Para anggota DPR-GR itu bukanlah wakil-wakil mahasiswa, tetapi cenderung atas nama golongannya sendiri-sendiri. Seperti golongan Islam, Katolik, dan lain sebagainya.

Menurut Gie tampaknya tokoh-tokoh KAMI sudah kembali ke induknya masing-masing. Mereka yang dari HMI mewakili golongan Islam, PMKRI wakil golongan Katolik dan sebagainya. Di hadapan golongan *moral force* menurut Gie lagi mahasiswa yang masuk parlemen sudah jatuh martabatnya. Gie mengungkapkan anggota parlemen mahasiswa mendapat mobil Holden, tiket KA, dan tiket pesawat terbang gratis untuk ke luar negeri dengan dalih tugas parlemen. Mereka dijebak golongan *vested interest*.

Gie menyorot kelemahan-kelemahan yang terjadi pada KAMI. Di antaranya, para pimpinan KAMI tidak dipilih dari

76. Soe Hok Gie dalam *Di Sekitar Demonstrasi-demonstrasi Mahasiswa di Jakarta* dalam Soe Hok Gie, *Zaman Peralihan*, Jakarta: Gagas Media; hal 3-14.

bawah. Tokoh-tokoh KAMI, mereka yang rata-rata berumur 30 tahun dan mereka seharusnya bukan mahasiswa lagi. Tepatnya mereka bukan mahasiswa berpolitik, tetapi politikus yang mempunyai kartu mahasiswa.

Yang menyedihkan juga, kalangan mahasiswa yang belakangan berpolitik praktis tersebut, tidak punya isu utama lagi. Dalam membicarakan, atau mengungkap kasus korupsi, suaranya tidak lantang lagi, seperti ketika di zaman perjuangan menyoroti rezim Orde Lama yang dinilai menyimpang.

Kalau kasus korupsi, atau penyelewengan itu melibatkan seniornya di induk organisasinya, mereka belum tentu berani bersuara. Masuk akal kalau banyak kalangan, setidaknya seperti Gie — salah satu tokoh muda yang berani melakukan otokritik terhadap kaum muda — yang mengkhawatirkan KAMI mengulangi kesalahan PPMI dulu. Ketika itu, institusi ini memiliki *vested interest* di era Sukarno.⁷⁷

Dari kalangan organisasi mahasiswa sendiri ada gerakan yang mencoba mengkaji kembali seperti apa Indonesia yang dicita-citakan. Sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam HMI, PMKRI, GMKI dan GMNI membentuk apa yang disebut Kelompok Cipayung pada 1972.

Konsepsi Indonesia yang dicita-citakan, seperti disepakati dan diteguhkan bersama oleh Kelompok Cipayung, antara lain Akbar Tanjung, Soerjadi, Chris Siner Key Timu, dan Binsar Sianipar adalah kristalisasi etos, kesadaran, dan pemikiran cerdas.

Ini bukan lembaga apalagi organisasi. Kelompok ini tak terikat oleh jaring-jaring struktural akan tetapi memiliki visi strategis. Kelompok Cipayung lahir dari kesadaran Indonesia

77. Lihat tulisan Soe Hok Gie *Moga-moga KAMI tidak Menjadi Neo PPMI* dimuat dalam Soe Hok Gie, *op.cit.*

akan kemajemukan.⁷⁸

Pada 1970 menurut Donald Wilhem dalam bukunya *Indonesia Bangkit* para mahasiswa mencoba beralih ke masalah korupsi yang diduga terjadi di kalangan atas. Mahasiswa mulai tidak puas terhadap kebijaksanaan dan pejabat pemerintah. Berbagai masalah yang disorot mahasiswa waktu itu adalah Pertamina, Proyek TMII yang dianggap mirip proyek Mercusuar, hingga peranan modal asing khususnya Jepang.⁷⁹

Puncak protes itu ialah demonstrasi mahasiswa, Januari 1974. Kita tahu akhirnya meletus Kerusuhan 15 Januari 1974 atau dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari (Malari) ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Indonesia.

Waktu dalam aksi mahasiswa, didukung masyarakat banyak, terjadi penjarahan dan pembakaran secara besar-besaran di DKI Jakarta, terutama di sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan sekitarnya.

Data yang ada menunjukkan, dalam protes anti-Jepang itu, setidaknya 807 buah mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa di mana-mana. Selain itu, sedikitnya 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, dan 775 orang kemudian ditahan. Lalu, dalam pendataan yang dilakukan, sebanyak 144 buah bangunan rusak berat dan 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Peristiwa kelabu yang meletus bersamaan dengan kedatangan tamu negara, yang memiliki investasi besar di Indonesia itu, jelas memukul pemerintahan Presiden Soeharto. Betapa tidak, di saat itu pemerintah sedang 'membujuk' agar Jepang terus berinvestasi, karena Indonesia berjanji memberi-

78. Anas Urbaningrum *Kelompok Cipayung dan FKPI* diambil dari situs <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/18/0057.html>
79. Donald Wilhem, *op.cit.*, hal.119



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Komite Nasional Pemuda Indonesia

Perkembangan lain yang terjadi pada masa Orde Baru ialah berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pelopornya adalah sejumlah tokoh Angkatan 1966, seperti Cosmas Batubara, Abdul Gafur, Aulia Rachman, dan puluhan tokoh lainnya pada 23 Juli 1973.

Dalam deklarasinya mereka menyatakan kelahiran KNPI bukti dari kepekaan dan kepeloporan pemuda atau generasi muda dalam menjawab tantangan peran kesejarahan. Itu dilakukan melalui menggalang persatuan dan kesatuan, mengkonsolidasi keanekaragaman potensi, membentuk sinkronisasi, dan sinergi partisipasi dalam rangka menyukseskan kegiatan pembangunan nasional.⁸⁴

Kehadiran KNPI yang mewadahi puluhan organisasi pemuda dan mahasiswa ini boleh dibilang kompromi sebagian pemuda dalam menyalurkan aspirasinya. Tentunya sebagian mahasiswa memandang dengan sinis, dan bahkan mencibir, sehingga tak sudi bergabung dalam institusi baru kepemudaan tersebut.

Sepertinya keberadaan KNPI mirip dengan gerakan pemuda yang mengambil jalan kooperatif pada masa Hindia Belanda. Pengkritik Orde Baru juga melihat, stabilitas pembangunan secara substansi mirip dengan *Rust en Orde* yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda.

Namun bagaimana pun juga KNPI memainkan peranan bagi tokoh-tokoh muda untuk berkiprah. Tetapi, pada perkembangan berikutnya, tidak semua para deklarator sejalan dengan pemerintah. Sebagian tokoh deklarator ini menunjukkan sikap kritis, terutama pada dasawarsa akhir Orde

84. Lihat situs www.knpi.net untuk melihat deklarator lengkapnya.

Baru. Misalnya saja, itu yang dilakukan tokoh-tokoh seperti Albert Hasibuan, Chris Sinner Key Timu, Ridwan Saidi, dan lain sebagainya.

Setelah 1982 boleh dibilang KNPI yang menjadi kekuatan pemuda. Kekuatan muda yang kritis lainnya umumnya bergerak di bawah tanah.

Pada paruh kedua 1980-an ada usaha untuk membangkitkan kembali gerakan mahasiswa, sekalipun Dewan Mahasiswa sudah berakhir dan Senat Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi cenderung bersikap lunak. Umumnya mereka mengangkat isu-isu lokal. Hal ini berlangsung hingga 1990-an.

Pada pertengahan 1980-an dan awal 1990-an muncul kelompok-kelompok studi mahasiswa yang mengingatkan pada kemunculan kelompok-kelompok studi pada 1920-an. Kelompok-kelompok studi ini menjamur di kampus-kampus dan biasanya mengadakan diskusi-diskusi di tempat-tempat kost mahasiswa, hingga yang resmi dalam organisasi intra kurikuler.

Para mahasiswa yang bergabung dalam kelompok-kelompok studi ini umumnya mencermati situasi ekonomi dan politik. Kita mafhum saat itu merupakan strategi para pemuda untuk tetap kritis di tengah batasan-batasan yang dilakukan rezim masa itu.

Sebagai contoh, kelompok studi mahasiswa yang mulai muncul pada pertengahan 1980-an di Yogyakarta adalah Kelompok Dasakung. Kelompok yang anggota terdiri atas sepuluh orang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengkritisi kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta, teru-

tama di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Salah satu hasil penelitian Dasakung pada masa itu adalah merebaknya penyakit sosial yang disebut sebagai kumpul kebo. Yaitu ditemukannya pasangan-pasangan hidup bersama sepasang mahasiswa layaknya suami istri.

Publikasi yang luas hasil penelitian ini rupanya membuat berang pemerintahan Presiden Soeharto, yang juga berasal dari Yogyakarta. Terbongkarnya kasus ini, meski oleh para akademisi dianggap positif, tetapi dianggap mencoreng keharuman Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

Setelah Dasakung menghilang, muncul kemudian Kelompok Studi Sosial Palagan. Dengan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi buku dan pementasan teater, kelompok ini dicap memiliki afiliasi dengan kelompok 'kiri'. Apalagi belakangan ditemukan ada mahasiswa yang tertangkap tangan menjual buku *Rumah Kaca* karangan Pramudya Ananta Toer yang waktu itu dilarang pemerintah. Mahasiswa penjual buku terlarang itu mengaku buku-buku koleksinya, terutama yang berbau 'kiri' ada yang dipinjam oleh pengurus Kelompok Palagan.

Dari situlah aparat keamanan melalui Kodim dan Korem setempat, menemukan alasan untuk sekalian memberangus Kelompok Palagan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta. Koordinator Kelompok Diskusi Palagan Isti Nugroho dan penjual buku Bambang Subono serta rekannya Bonar Tigor divonis enam tahun, dan mendekam di LP Wirogunan Yogyakarta.

Sekretaris Kelompok Palagan, Yohanes S. Widada, lolos dari jerat hukum ini, karena pengadilan tidak bisa membuk-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pada 1990-an lahir suatu deklarasi mahasiswa Indonesia yang redaksionalnya mirip dengan Sumpah Pemuda. Antara lain deklarasi itu berbunyi: "1. Kami mahasiswa Indonesia menjunjung tinggi kebenaran dan bertekad membebaskan rakyat Indonesia dari ketidakadilan. 2. Kami mahasiswa Indonesia setia dan rela berkorban pada kepentingan rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan 3. Kami mahasiswa Indonesia sementara berjuang dengan landasan solidaritas utuh."⁸⁵

Tokoh LSM, Zaim Saidi dalam sebuah bukunya menyebutkan bahwa kemunculan LSM adalah reaksi sebagian masyarakat atas kebijakan pembangunan Orde Baru. Mereka terdiri dari empat generasi/ Pertama, generasi pelaku langsung yang mengatasi persoalan masyarakat. Kedua, mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri, misalnya untuk meningkatkan pendapatannya. Ketiga, LSM yang melihat masalah tingkat lokal sebagai akibat persoalan regional-nasional. Dan keempat, LSM yang mempunyai orientasi untuk tujuan *people movement*. Sejak 1970-an hingga 1990-an muncul 1.000 hingga 2.000 LSM.⁸⁶

Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an demonstrasi mahasiswa mulai mengeras. Beberapa di antaranya akhirnya memakan korban. Pada Agustus 1989 terjadi penangkapan terhadap aktivis mahasiswa bernama Bambang Beathor Surjadi. Ia dipersalahkan, karena menyebarkan pamflet dan mengorganisasi demonstrasi yang menentang kenaikan tarif listrik.

Pada 14 Desember 1993 Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR dengan isu Soeharto harus bertanggung jawab terhadap penyelewengan HAM. Pemerintah bereaksi keras atas aksi

85. Sinar, 25 April 1994.

86. Zaim Saidi, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

itu. Sebanyak 21 mahasiswa ditangkap dan dihukum 8 bulan hingga 14 bulan, di antaranya Nuku Soelaiman, Yenny Rosa Damayanti, padahal sebelumnya vonis hanya 6 bulan.⁸⁷

Kelemahan gerakan mahasiswa pada 1980-an hingga 1990-an terletak pada sifatnya yang sporadis dan momentumnya yang tidak tepat. Di sisi lain belum ada hal yang membuat masyarakat ikut bergerak hingga mahasiswa dan rakyat bisa menyatu seperti pada 1966. Sekalipun Orde Baru pelan-pelan menciptakan ketimpangan sosial, kehidupan ekonomi sampai 1990-an masih relatif stabil. Lalu, sekalipun isu korupsi dan utang luar negeri yang makin besar sudah terdengar, dan mulai terangkat ke permukaan, namun kesadaran itu baru pada kalangan terdidik.

Antara 1994-1998 rezim Orde baru sepertinya mengumpulkan banyak lawan dan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Soekarno dahulu, dengan rezim Orde Lama. Pembredelan tiga media, Tempo, Editor dan Detik pada pertengahan 1994 membuat Orde Baru mendapat lawan baru dari kaum jurnalis.

Mahasiswa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan unjuk rasa menuntut pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sejumlah aliansi gerakan pemuda dan mahasiswa terbentuk. Agak aneh juga ketika demonstrasi ini ditandingi oleh Forum Pemuda Pers Pancasila yang mendukung kebijakan pemerintah.⁸⁸

Lalu, sejak itu muncul kekuatan perlawanan para wartawan muda, yang antara lain bergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sebagian di antaranya, karena tidak memiliki media resmi, dalam artian media massa cetak yang diperkenankan terbit dengan SIUPP memilih jalur bawah tanah.

87. Sinar, 27 Juni 1994.

88. Sinar, 11 Juli 1994.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pada hari itu. Mereka ditangkap dengan tuduhan subversif dan dipenjarakan. Padahal kalau dianalisis kekuatannya tidak mungkin PRD mampu berbuat makar. Awal gerakannya memang dari gerakan mahasiswa, namun relatif tidak terlalu besar. Terbukti pada Pemilu 1999 partai ini tidak memperoleh suara yang signifikan.

Orde Baru juga mendapat lawan lain yang potensial, yaitu dari kelompok Islam terdidik lewat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pembentukan ICMI pada 1990 memang membuat kalangan Islam tertentu terakomodir. Tetapi tidak berarti bisa mencegah munculnya tokoh intelektual muslim yang bersikap kritis. Di antaranya muncul M. Amien Rais, aktivis ICMI, yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang berani menyuarakan suksesi kepemimpinan nasional.

Tindakan Amien Rais, yang belakangan dikenal sebagai Tokoh Reformasi, ini menimbulkan tantangan dari tokoh ICMI dan Muhammadiyah lainnya. Tetapi, semua itu justru membuat pakar politik dari UGM itu semakin populer. Sementara yang gerah terhadap aksi perlawanan dari bekas Ketua MPR ini, justru merosot popularitasnya.

Pencopotan Amien dari ICMI dan menggoyanginya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah membuat gusar sejumlah kaum muda. Aksi unjuk rasa dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Forum Mahasiswa Universitas Achmad Dahlan pada Februari 1997 dan Maret 1997. Goyangan terhadap Amien diduga didalangi Pemerintah Orde Baru.⁸⁹

Kemunculan ICMI juga mengundang munculnya kelompok intelektual lain, berdasarkan aliran keagamaan mau-

89. Suara Independent NO 4/III/Februari 1997.

pun nasionalis. Maka, kita kenal ada Ikatan Cendekiawan Kristen Indonesia, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, sampai Ikatan Cendekiawan Kebangsaan Indonesia, dan lain sebagainya. Lawan Orde Baru juga muncul dari sempalan PPP, yang mendirikan PUDI, Sri Bintang Pamungkas. Meski terbukti aktivitas politik Sri Bintang Pamungkas lewat partainya itu, tidak berhasil meraih dukungan massa, tetapi aksinya cukup mewarnai sejarah perpolitikan nasional, yang meriah di era Orde Baru.

Satu hal, usaha pemerintahan Orde Baru, atau Presiden Soeharto untuk menyingkirkan potensi oposisi, jelas gagal, dan nyaris tidak membuahkan apa-apa, selain pertentangan, dan perlawanan di mana-mana. Langkah Orde Baru itu, betapa pun kuatnya Presiden Soeharto saat itu, tidak berhasil menambah pamornya. Hal yang pasti adalah Soeharto justru makin mengumpulkan banyak lawan.

Hampir bersamaan dengan itu, krisis ekonomi melanda dunia, terutama kawasan Asia Pasifik, dan terutama Indonesia. Seperti kita tahu, negeri ini nyaris jatuh terduduk didera krisis ekonomi berkepanjangan, yang di tahun 2008 masih terasa sakit pukulannya.

Negara kita belum sepenuhnya dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi, meski makro ekonomi dinyatakan membaik. Mikro ekonomi cenderung masih jalan di tempat, sektor riil belum sepenuhnya bangkit, dan pengangguran terus meningkat setiap tahunnya, karena lapangan kerja tidak tersedia.

Itulah yang menyulut demonstrasi berkepanjangan, disertai aksi pendudukan Gedung MPR/DPR oleh mahasiswa, dan ujungnya Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Demikianlah, seperti halnya Soekarno, sebab utama kejatuhan Orde

Baru dan Soeharto juga ditentukan oleh faktor ekonomi. Kalau situasi ekonomi stabil bisa jadi Orde Baru masih lebih lama bertahan, dan Soeharto tetap berkuasa.

Tewasnya Mahasiswa Trisakti

Demonstrasi mahasiswa semakin marak. Seperti biasanya diatasi dengan tindakan represif. Tindakan represif paling fatal terjadi pada 12 Mei 1998, dimana empat mahasiswa Trisakti terbunuh dan puluhan lain luka-luka dalam demonstrasi berdarah di bilangan Grogol, Jakarta Barat. Situasi itu kemudian turut memicu terjadinya berbagai kerusuhan di Jakarta pada 13-14 Mei 1998.

Tampak pemerintah tak berdaya. Mahasiswa bertindak dengan melakukan pendudukan Gedung DPR-MPR dengan tujuan menurunkan Presiden Soeharto. Hanya dalam sembilan hari setelah serangkaian kejadian yang menegangkan dan mengerikan di Jakarta dan berbagai kota lainnya, akhirnya Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Habibie pun dilantik menggantikannya sebagai masa transisi. Era reformasi pun di mulai.

Gerakan mahasiswa 1998 boleh dibilang merupakan sebuah peristiwa yang mengundang kekaguman. Tidak hanya bagi publik di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hal ini karena gerakan kaum muda terpelajar inilah, yang berhasil menumbangkan sebuah rezim yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun.

Padahal, sampai pada awal 1998 tidak ada tanda-tanda akan muncul gerakan yang berarti untuk melawan kekuasaan Soeharto. Aksi-aksi perlawanan berskala kecil baru muncul



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

kekuatan lama tidak bercokol lagi. Tetapi, akhirnya mereka menghadapi tantangan, bukan saja dari kalangan militer dan aparat keamanan lainnya, tetapi juga kaum muda, yang telah menganggap persoalan sudah beres, Soeharto dan Orde Baru sudah tumbang.

Peneliti CSIS, Indra J. Piliang menganalisis bahwa gerakan mahasiswa 1998 memang berhasil melengserkan Presiden Soeharto. Namun itu baru puncaknya, sementara sistemnya belum. Ya, walaupun diakui ada perubahan berbagai undang-undang bidang politik dan sudah mulai demokratis. Cuma masalahnya sekarang adalah orang-orangnya. Yang lebih disesalkan ialah bekas aktivis 1998 malah bergabung pada partai politik kekuatan lama, yang sebenarnya dulu ditentang, dan diperjuangkan untuk ditumbangkan sekaligus.⁹¹

Yang menarik ialah jumlah komunitas mahasiswa yang terlibat dalam gerakan Mei 1998 itu lebih dari 50 kelompok. Semuanya 'mengingat' di DPR saat aksi pendudukan berlangsung. Mereka datang dari berbagai daerah, selain Jakarta dan sekitarnya, juga dari Bandung, Yogyakarta, Bali, Sumatera Barat dan lain sebagainya, di antaranya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKMSJ), Forum Kota (Forkot), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), KM ITB, KM Unpar, BEM se-Trisakti, dan lain sebagainya.

4. Era Reformasi

Reformasi itu adalah perubahan secara mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan secara mendasar tersebut tentu muaranya adalah perubahan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik, adil,

91. *Ibid.*

makmur-sejahtera, dan demokratis. Dalam konteks gerakan kepemudaan harus mengambil posisi dan peran kepemimpinan secara komprehensif dalam konteks moral, intelektual, dan politik dalam arti yang luas, yakni politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi bangsa.

Apabila era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998, mundurnya Soeharto dan dilantiknya B.J. Habibie menjadi Presiden RI berikutnya, maka sejarah kepemudaan dimulai dengan terfragmentasinya gerakan mahasiswa. Sebagian mahasiswa meninggalkan Gedung DPR dan menganggap tujuan pendudukan sudah selesai. Namun sebagian lagi masih menduduki gedung DPR karena menganggap Habibie sebagai bagian dari Orde Baru.

Pada 22 Mei 1998 di Gedung MPR/DPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan, dengan mahasiswa yang masih bertahan di gedung dewan. Mahasiswa menganggap Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Akhirnya, tentara mengevakuasi mahasiswa dari gedung wakil rakyat ke Universitas Atmajaya.

Sekalipun Habibie melakukan terobosan-terobosan, sebagian mahasiswa belum juga puas. Ketika itu, era kepemimpinan Presiden Habibie sudah memulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Habibie juga memberikan kebebasan pers, dengan menghapuskan elemen pengajuan SIUPP, yang tidak pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Sejak itu semua orang bebas mendirikan media massa cetak, karena tidak perlu izin lagi. Bermunculanlah beragam harian, koran, tabloid, dan majalah dengan gaya bahasa,



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dicalonkan dalam Sidang Umum MPR. Ia digantikan oleh Gus Dur.

Dalam aksi mahasiswa yang marak di era Habibie itu, bentrokan kerap terjadi antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dan satuan sipil Pam Swakarsa. Dalam bentrokan pada Peristiwa Semanggi, belasan orang tewas dan ratusan lain luka-luka. Tragedi Semanggi ini merupakan catatan kelam dalam sejarah Indonesia seperti halnya Tragedi Trisakti, khususnya bagi sejarah kaum muda.

Dukungan rakyat sekitar Semanggi terhadap gerakan mahasiswa ini cukup mengharukan. Menurut laporan Tempo sekitar 500 mahasiswa ditampung menginap, dijamu makan gratis, bahkan diberi pakaian ganti. Para mahasiswa ini disambut bagaikan pahlawan.

Pada November 1998 itu para mahasiswa berhasil mempertemukan empat tokoh nasional, yaitu KH Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan Sri Sultan Hamangkubuwono di Ciganjur. Hasilnya Deklarasi Ciganjur yang melahirkan beberapa imbauan. Antara lain Selamatkan Negeri RI dari marabahaya, pelaksanaan Pemilu selambat-lambatnya Mei 1999 dan Sidang Umum tiga bulan sesudahnya, menghapus dwi fungsi ABRI, penghapusan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), dan penarikan Pam Swakarsa dari Sidang Istimewa MPR.⁹²

Perkembangan berikutnya Pemerintahan Habibie berhasil menyelenggarakan Pemilu 7 Juni 1999 yang diikuti 48 Parpol, dengan hasil hanya lima parpol yang meraih suara besar, yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Sejarah mencatat walaupun partai pimpinan Megawati, PDI Perjuangan, sebagai pemenang, yang terpilih sebagai Presiden adalah Gus

92. Tempo, 23 November 1998.

Dur dalam Sidang Umum MPR 1999.

Pada September 1999 terjadi satu peristiwa lagi yang menjadi catatan kelam sejarah kaum muda Indonesia, yaitu Tragedi Semanggi II yang menewaskan seorang mahasiswa Fakultas Teknik UI, Yap Yun Hap. Mahasiswa pada waktu itu memprotes UU Penanggulangan Bahaya (UU PKB) yang substansinya mirip UU Subversif yang menjadi lambang penindasan masa Orde Baru.

Demo Buloggate

Setelah tahun 2000, para mahasiswa masih terlibat dalam unjuk rasa, terutama setelah Presiden Abdurrahman Wahid terlibat kasus yang disebut Buloggate. Namun gerakannya tidak lagi sebesar massa sebelumnya. Bahkan pada waktu demonstrasi pada era peralihan Gus Dur ke Megawati gerakan mahasiswa seolah-olah mengalami fragmentasi.

Yang pertama BEMI (Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia), termasuk dalam hal ini Famred, PMII, Jarkot, Forkot, BEM PT se-Jawa Timur yang cenderung mendukung Gus Dur. Kedua, BEMSI atau badan eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, terdiri dari UI, ITB, IPB, UNJ, yang arahnya menuntut Gus Dur turun. Ketiga, gerakan mahasiswa yang membawa bendera masing-masing, KAMMI, HMI MPO, HMI DIPO, IMM yang menjadikan Gus Dur hanya *entry point*, namun sasarannya adalah *clean government*.⁹³

Namun paling tidak hingga 2001-2002 menurut sejumlah pengamat, gerakan mahasiswa masih menjadi gerakan moral. Mahasiswa masih melihat agenda reformasi harus diselamatkan dan harus dikawal agar tidak hilang di tengah jalan.

93. *Ibid.*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Soekarno, *founding father* Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia pernah menyampaikan dalam sebuah pidatonya bahwa ia sanggup mengguncangkan dunia hanya dengan sepuluh pemuda yang hatinya berkobar. Tidak ada yang pernah meragukan Soekarno sebagai “juru bicara” negara-negara dunia ketiga di tengah ancaman perang dingin, dan tidak ada yang pernah meragukan kemampuannya untuk mengguncang dunia dengan kharisma dan kepemimpinannya menyatukan ratusan suku-bangsa yang ada di Indonesia. Ia memiliki keyakinan terhadap generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin dunia.

Akan tetapi mencetak generasi muda yang memiliki hati berkobar dan sanggup mengguncangkan dunia bukanlah pekerjaan mudah. Iklim sosial-politik yang kondusif bagi pemuda untuk berkiprah diperlukan agar regenerasi kepemimpinan dan sistem edukasi bagi generasi muda dapat berjalan secara berkelanjutan. Regenerasi kepemimpinan kaum muda dalam organisasi kepemudaan harus berpijak pada *fair-competition*. Kesempatan harus diberikan kepada generasi muda yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dan tidak berdasarkan senioritas.

BAB III

FONDASI POLITIK MULTIKULTURALISME

Di tengah dinamika globalisasi saat ini, fondasi politik multikulturalisme kian diperlukan untuk memperkuat bangunan kebangsaan. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi—kadang ditafsirkan sebagai ideologi—yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.

Multikulturalisme bertentangan dengan monokultura-

lisme dan asimilasi. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif (istilah 'monokultural' juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (*pre-existing homogeneity*). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.

Bikhu Parekh (2001) dalam *Rethinking Multiculturalism*, berpendapat bahwa istilah multikulturalisme terkait dengan kebudayaan. Konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi asasnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.¹⁰⁰

Selain itu juga multikulturalisme mengandung tiga komponen penting, yakni terkait dengan kebudayaan, konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia. Sebab, hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan. Artinya, perbedaan menjadi asasnya dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif. Karena itu, multikulturalisme harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan

100. Achmad Fedyani Saifuddin, *Kegamangan Multikulturalisme di Indonesia*, Kompas, 21, Januari, 2006.

kebudayaan warga negara.

Prof. Alois A. Nugroho (2003) berpendapat, multikulturalisme merupakan bentuk moderat dari postmodernisme. Multikulturalisme memuat banyak kelebihan etis maupun praktis, namun dia mengandung kekurangan dalam satu hal besar, yakni membatasi fungsi rasio hanya sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan hidup dan hidup lebih sejahtera.

Multikulturalisme menganggap bahwa etnosentrisme, xenosentrisme maupun xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan di sini, kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki "hak hidup" yang wajib dihormati.

Keanekaan budaya yang masing-masing duduk sama rendah berdiri sama tinggi ini merupakan konsientisasi berikut yang disodorkan oleh multikulturalisme. Pada tingkat praktis, multikulturalisme juga menunjuk kemungkinan "penyesuaian budaya" atau "dialog budaya" dalam pengalaman individual maupun kelompok.¹⁰¹

Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (*English-speaking countries*), yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elite. Beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Belanda dan Denmark, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan monokulturalisme. Pengubahan kebijakan

101. Alois A. Nugroho, *Benturan Peradaban, Multikulturalisme dan Fungsi Rasio*, Kompas, 4 April, 2003.

tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, serta beberapa negara lainnya.

Masyarakat modern semakin dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Hal ini seringkali disebut sebagai tantangan dari multikulturalisme. Namun istilah multikultural mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri.

Ada berbagai cara dimana minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai dari penaklukan dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri sampai pada imigrasi sukarela perorangan dan keluarga. Perbedaan dalam cara penggabungan itu mempengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas. Generalisasi mengenai tujuan atau konsekuensi dari multikulturalisme dapat sangat menyesatkan. Banyak dari perdebatan publik mengenai multikulturalisme cenderung salah kaprah.¹⁰²

Satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu, dimana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, dalam arti sosiologis ini berkaitan dengan pengertian suatu masyarakat atau suatu kebudayaan. Konsep ini sering dipertukarkan. Oleh karena itu, suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa, bukanlah negara bangsa, melainkan negara multibangsa, dan kebudayaan terkecil membentuk minoritas bangsa. Masuknya berbagai bangsa dalam satu negara dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika suatu masyarakat satu kebudayaan diserang dan ditaklukkan

102. Will Kymlicka (2002), *Kewargaan Multikultural*. Jakarta : Pustaka LP3ES Jakarta. Halaman 13.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

wargaan akan menjadi kekuatan lain untuk perpecahan dan bukannya cara untuk menumpuk persatuan dalam menghadapi keragaman sosial yang mengikat. Kewargaan harus menjadi forum dimana orang lebih mementingkan perbedaan mereka dan berpikir mengenai kebajikan bersama dari semua warga (Kukathas, 1993 : 156; Krusteva, 1993:7; dan Cairns, 1993 : 1995).¹⁰⁵

1. Pluralisme, Multikulturalisme, dan Demokrasi

Pluralisme dan multikulturalisme sebagai pilar yang sangat penting bagi perjalanan demokrasi di berbagai negara. Syarif Ibrahim Alqadri (2008) berpendapat, pluralisme berhubungan erat dengan dan menjadi dasar dari multikulturalisme. Idealnya, suatu masyarakat multikultural merupakan kelanjutan dari pluralisme. Masyarakat multikultural biasanya terjadi pada masyarakat plural. Sebaliknya, pluralisme bukan apa-apa tanpa menjadi multikulturalisme. Pengakuan terhadap pluralisme seharusnya meningkat menjadi multikulturalisme. Namun, kenyataannya, kesenjangan selalu ada antara pengakuan pluralisme dengan pelaksanaan multikulturalisme.

Meskipun pluralisme oleh sebagian elit agamawan dituduh sebagai biang pengeruhan keyakinan, tetapi secara ontologis, pluralisme menjadi pendasaran etis bagi peneguhan sikap keberagaman yang lebih inklusif, terbuka, dan toleran. Disekapnya makna pluralisme dalam pendiskreditan pihak-pihak yang mengaku mewakili memiliki otoritas agama adalah sebetulnya kekerasan epistemik, kerancuan semantik bahkan sikap pembodohan.

105. Ibid, hal. 265-266.

Pluralisme sendiri lebih merujuk pada kondisi apa adanya sebagai suatu realitas (*what it is/ das Sein*) dalam masyarakat, sedangkan multikulturalisme adalah karakter atau kondisi normatif yang seharusnya dilakukan (*das Sollen/ what should be/what ought to be done*) oleh anggota masyarakat yang plural. Dengan begitu, multikulturalisme dapat berbentuk karakter individu atau masyarakat yang multikultural atau kedua-duanya sekaligus.

Karakter individu yang multikultural cenderung akan tercipta dalam masyarakat multikultural. Sosialisasi mengenai pentingnya hidup bersama dalam masyarakat plural akan menciptakan karakter multikultural, dan sebaliknya ia akan memperkuat masyarakat multikultural. Masyarakat seperti ini merupakan masyarakat yang memenuhi unsur normatif yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat majemuk dalam bentuk, seperti dikemukakan oleh Rex (1985) dan May dan Shari (2001), menerima perbedaan pendapat, ide, nilai budaya dalam kesederajadan; memahami, mengerti, menghargai dan menilai budaya, pendapat, ide, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan orang lain.

Selain itu juga menerima adanya toleransi untuk menghargai pendapat, program dan karya orang lain kendatipun berbeda; dan memperlakukan semua sisi kebenaran secara merata. Karenanya, masyarakat multikultural tidak hanya berfungsi sebagai media/alat (instrumen) manajemen konflik, tetapi juga berhubungan timbal balik dengan prinsip demokrasi¹⁰⁶

Terkait dengan konsep multikultural ini, B. Harri Julian (2004) berpendapat, sifat multikultural menunjuk fakta keragaman, sementara multikulturalisme menunjuk sikap

106. Syarif Ibrahim Alqadrie, Pluralisme, *Multikulturalisme dan Demokrasi*, Pontianak Post, 8 Januari, 2008.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

fikasi seperti ini menghindari tumpang tindih dalam kategorisasi persoalan, dan menyelamatkan istilah multikulturalisme dari bahaya menjadi slogan. Meski demikian, ada potensi kebingungan di mana kita hendak menempatkan agama.

Kerangka kedua merupakan turunan kerangka pertama, yaitu akomodasi kepentingan. Bila diperas dalam fakta kerasnya, isu terpenting multikulturalisme sebenarnya terletak pada manajemen kepentingan. Aneka kelompok dalam masyarakat apakah itu suku bangsa atau kelompok etnis, mengajukan klaim agar unit politik yang lebih besar seperti negara melakukan sesuatu demi kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu. Klaim-klaim itu membungkus kepentingan yang biasanya lebih dasariah. Masalahnya kini, ada pada definisi arti 'kepentingan'.¹⁰⁷

Bagaimana multikulturalisme berhubungan dengan demokrasi? Syarif Ibrahim Alqadrie (2008) berpendapat, secara lebih hakiki, menghargai segala macam perbedaan, ide, karya dan unsur budaya dari kelompok etnis lain yang berbeda sebagai konsekuensi dari keberagaman, serta adanya toleransi terhadap perbedaan, merupakan pelaksanaan prinsip demokrasi. Sebaliknya, prinsip demokrasi yang diterapkan secara bertanggung jawab dan konsekuensi dalam masyarakat majemuk akan menjamin tercipta karakter dan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural dan masyarakat demokratis menjamin kebebasan berkreasi, berusaha dan menghargai perbedaan demi kemaslahatan bangsa atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam masyarakat multikultural, tidak ada benturan sama sekali antara karakter menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan, di satu pihak, dengan saran dan kritik

107. B. Hari Juliawan, *Kerangka Multikulturalisme*, Kompas, 28, September, 2004.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

geografi, kemampuan ekonomi, dan bahkan ras.

Di masa lalu, kekuatan pengikat keanekaragaman itu adalah politik sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan pemerintah yang otoritarian. Pada masa kini apabila konsepsi multikulturalisme itu digarap lebih jauh, selain dari keanekaragaman di atas, juga persoalan mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan yang juga mengandung kompleksitas persoalan.

Lebih lanjut Ahmad Fedyani Saefuddin (2006) menjelaskan setidaknya ada tiga model kebijakan multikultural negara. *Pertama*, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi.

Dalam kebijakan ini setiap orang—bukan kolektif—berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri negara. Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jatidiri individu.

Ada sentimen-sentimen kesukubangsaan yang memiliki potensi pemecah-belah dan penghancuran di antara sesama bangsa Indonesia. Antara lain karena masyarakat majemuk menghasilkan batas-batas suku bangsa yang didasari oleh stereotip dan prasangka, yang menghasilkan penjenjangan sosial seara primordial yang subyektif. Konflik antaretnik dan antaragama yang terjadi, berintikan pada permasalahan hubungan antara etnik asli setempat dengan pendatang. Konflik-konflik itu terjadi, karena adanya pengaktifan jati diri etnik untuk solidaritas memperebutkan sumberdaya yang ada.

Dari hasil penelitian Dr. Parsudi Suparlan di Kalimantan dan Maluku ditemukan, karena ideologi keetnikan dan pengaktifan jatidiri etnik. Seperti yang terjadi di Sambas, preman Madura yang mengawali konflik dianggap mewakili suku Madura, sehingga konflik berkembang menjadi konflik antaretnik. Demikian pula yang terjadi di Ambon, dimana bentrokan antara penduduk Ambon dengan penduduk Buton Bugis Makassar, menjadi konflik antaragama. Akhirnya menunjukkan, bahwa masyarakat majemuk tidak pernah menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis, melainkan berpotensi otoriter dan despotis, karena corak etniknya yang beraneka-ragam, dari feodalistis dan paternalistis sampai etnosentris.

Masyarakat majemuk yang menekankan keanekaragaman etnik perlu dikaji dan digeser pada pluralisme budaya [multikulturalisme], yang mencakup tidak hanya kebudayaan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dinamika peran kaum muda di negeri ini di dalam mengawal proses demokratisasi, rekonstruksi ke-Indonesia-an dan merumuskan kembali daya kompetisi Indonesia di dalam merespons perkembangan global.

Fokus perhatian terpenting di sini secara mendasar adalah pemuda. Soekarno pernah berkata, dengan sepuluh orang pemuda, maka dia yakin bisa merubah Indonesia. Keyakinan Soekarno tersebut nampaknya penting sekali untuk dilihat lebih mendalam terkait dengan potensi, masa depan, dan kapasitas serta nasionalisme kalangan pemuda di dalam membangun bangsa dan negara. Dalam hal ini, bagaimana daya jangkau berpikir dan cita-cita kaum muda adalah potensi luar biasa di dalam membangun kembali nasionalisme dan kemakmuran bangsa.

Terkait dengan kepemimpinan kaum muda ke depan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana meletakkan kembali kepeloporan kaum muda Indonesia di tengah menguatnya globalisasi dan liberalisasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang saat ini berlangsung?

Pertanyaan ini tentu saja harus diuraikan lebih mendalam, karena globalisasi dan liberalisasi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia memiliki beragam aspek dalam kehidupan generasi muda.

Keberadaan kaum muda sebagai sumber daya bangsa, telah teruji dalam berbagai kurun sejarah perubahan peradaban dunia di sini menjadi kekuatan kunci yang strategis. Dari berbagai perspektif, harapan kepeloporan nampaknya hanya bisa ditunggu dari kaum muda.

Namun hal ini juga akan tergantung pada sejauh mana,



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



REVOLUSI POLITIK KAUM MUDA. Ini merupakan sebuah buku yang menggambarkan kecemasan kaum muda Indonesia dewasa ini. Yaitu kecemasan tentang bagaimana integritas bangsa dan negara ini diperjuangkan dan dipertahankan. Kaum muda yang hidup di tengah bangsa dengan lebih dari 220 juta jiwa, memang layak gelisah. Karena di depan mata mereka, berdiri sebuah fatamorgana yang menakutkan. Yaitu ancaman pertikaian antaretnis, perpecahan antardaerah, dan ancaman hancurnya sebuah bangsa dan negara: Indonesia.

Buku ini mengupas seperti apa entitas pluralitas dan multikulturalitas yang menjadi fondasi keberadaan Indonesia. Dari setiap jengkal fakta sejarah bangsa dan negara ini, kenyataan adanya pluralitas dan multikulturalitas justru menjadi modal yang sangat kuat untuk membangun bangsa.

Kaum muda Indonesia sangat memahami dan mengerti, betapa kokohnya kekuatan moral yang dibangun para pemuda dari seluruh penjuru Kepulauan Nusantara pada perempat pertama abad ke-21 silam. Apa yang kini kita banggakan sebagai Sumpah Pemuda, merupakan sahadat suci para pejuang republik ini.

Buku ini menegaskan kembali, semangat multikulturalisme hendaknya dilipatgandakan. Sehingga menjadi modal yang semakin kuat dalam membentuk tali-temali bangsa. Menjadi modal yang kuat dalam hal bahu-membahu mempertahankan, memperkokoh dan membangun Indonesia kini dan masa datang.

MUHAMMAD UMAR SYADAT HASIBUAN, lahir di Rantau Prapat, 30 Oktober 1977. Setelah menghabiskan masa kecilnya di kampung halaman, di Rantau Prapat, Sumatera Utara, Umar Syadat pernah hijrah untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Setelah itu, ia balik ke Sumatra, tepatnya ke Kota Jambi untuk belajar filsafat pada IAIN STS Jambi.

Kemudian Umar merantau ke Jakarta, belajar di Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan program S-2 bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, kini ia sedang menyelesaikan program doktornya di Universitas tersebut.

Berbagai kegiatan kepemudaan dilibatinnya. Terutama sekali KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Kegiatan lain yang tidak dilupakannya adalah menulis di media massa. Selain itu Umar juga menulis karya ilmiah berjudul *Gerakan Politik Islam di Aljazair dan Sudan*, dari tangannya juga telah lahir sebuah buku berjudul *Paradigma Baru Pergerakan PMII*.

Kini, Umar Syadat menjadi Staf Khusus Menteri pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan juga menjabat Komisaris PT Yodya Karya.

Yayasan Obor Indonesia

Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230

Telp.: 021-31926978

021-3920114

Faks.: 021-31924488

Email: yayasan_obor@cbn.net.id

Website: www.obor.or.id

ISBN: 978-979-461-704-5



9 789794 617045